



## A. Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan RPJMN ke-4 (empat) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN 2020-2024 bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Tujuan RPJMN 2020-2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Target-target dari 17 tujuan (*goals*) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam rangka percepatan pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan 6 (enam) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan *inovatif* yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan *adaptif*. Keenam pengarusutamaan (*mainstreaming*) memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Selain mempercepat pembangunan yang berkelanjutan harus dapat menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Visi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin periode 2020-2024 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024 yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi, yaitu :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sejalan dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, untuk periode 2020-2024 Presiden telah menetapkan 5 Program Prioritas Pembangunan Indonesia Maju, yang meliputi :

1. Pembangunan SDM;
2. Pembangunan Infrastruktur;
3. Penyederhanaan Regulasi;
4. Penyederhanaan Birokrasi;
5. Transformasi Ekonomi.

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Terkait dengan hal tersebut, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

## **B. Arah Kebijakan dan Strategi**

Berdasarkan arah kebijakan pada RPJMN 2020-2024, secara umum arah kebijakan pokok pembangunan berbasis kewilayahan untuk kurun waktu 2020- 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, kawasan perbatasan, dan daerah tertinggal yang difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan aksesibilitas, dan pengembangan ekonomi yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah;
2. Optimalisasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah (KEK, KI, KPBPB, Destinasi Wisata, dan kawasan lainnya yang telah ditetapkan) yang didukung

- dengan konektivitas antar-wilayah yang tinggi untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam dan daya saing wilayah;
3. Peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah dan pemerintah desa (kelembagaan, keuangan dan SDM Aparatur) untuk meningkatkan kemudahan perizinan dan agar tercapainya pemenuhan standar pelayanan minimum;
  4. Penataan pola hubungan pusat-daerah, pengembangan kerjasama antar-daerah, polapola kolaborasi multipihak, dan menghasilkan inovasi daerah;
  5. Optimalisasi Wilayah Metropolitan (WM) dan kota besar di luar Jawa, termasuk perencanaan ruang, perencanaan investasi dan pembiayaan pembangunan dengan tetap mempertahankan pertumbuhan dan meningkatkan daya dukung lingkungan untuk WM dan kota besar di Jawa;
  6. Pengembangan rencana pemindahan Ibukota keluar pulau Jawa ke posisi yang lebih seimbang secara spasial dan ekonomi;
  7. Peningkatan peran dan efisiensi pelayanan kota kecil-menengah untuk meningkatkan sinergi pembangunan perkotaan dan pedesaan;
  8. Penegakan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi bencana melalui peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR serta mempercepat penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional;
  9. Peningkatan kepastian hukum hak atas tanah melalui sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan termasuk wilayah sekitarnya; publikasi batas kawasan hutan dan non hutan dalam skala kadastral; dan deliniasi batas wilayah adat;
  10. Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum melalui pembentukan bank tanah.

Strategi pembangunan berbasis kewilayahan pada kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut :

1. Strategi pertumbuhan ekonomi melalui :
  - a. Operasionalisasi dan peningkatan investasi pada pusat-pusat pertumbuhan wilayah/kawasan strategis yang telah ditetapkan diantaranya: KEK, KI, KSPN/DPP dan sebagainya; dan
  - b. Pengembangan sektor unggulan: pertanian, industri pengolahan, pariwisata dan jasa lainnya.
2. Strategi pemerataan melalui :

Pengembangan ekonomi wilayah/lokal melalui penyediaan sarana prasarana perekonomian, termasuk pemanfaatan teknologi komunikasi digital, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik di daerah tertinggal, desa dan Kawasan Perdesaan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten, kawasan transmigrasi, maupun kawasan perbatasan secara terintegrasi dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi/kawasan strategis di sekitarnya; dan Pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah, terutama di daerah tertinggal, desa dan kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi, maupun kawasan perbatasan.

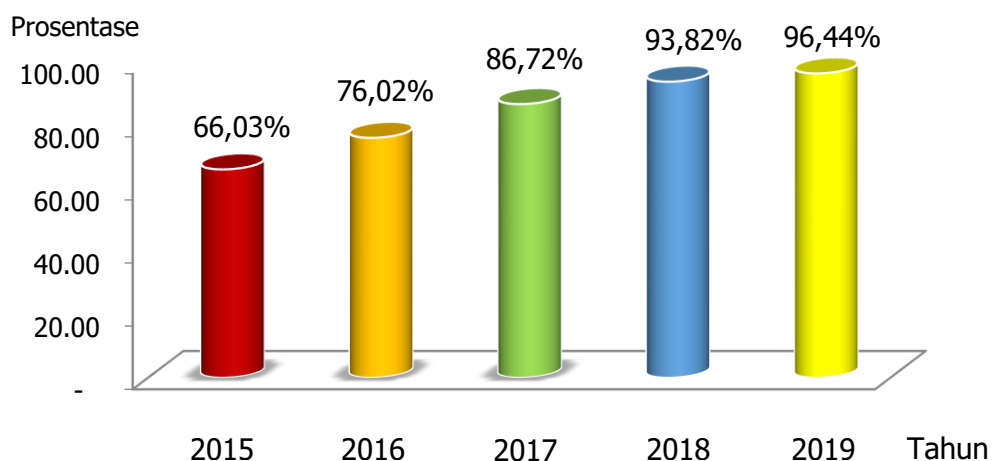
## C. Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2015-2019

### 1. Penyerapan Anggaran Periode 2015-2019

Dilihat dari aspek penyerapan anggaran, bahwa kinerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan periode 2015 s.d 2019 dikategorikan "**Baik**", hal ini dapat dilihat dari *trend* peningkatan besarnya anggaran yang terserap setiap tahunnya, yaitu :

- Tahun 2015 terealisasi anggaran sebesar Rp.244.826.194.572 atau 67,03% dari total pagu anggaran sebesar Rp.365.224.467.000.
- Tahun 2016 terealisasi anggaran sebesar Rp.146.739.028.495 atau 76,02% dari total pagu anggaran sebesar Rp.193.024.380.000.
- Tahun 2017 terealisasi anggaran sebesar Rp.169.977.528.880 atau 86,72% dari total pagu anggaran sebesar Rp.195.998.552.000.
- Tahun 2018 terealisasi anggaran sebesar Rp.150.112.095.473 atau 93,82% dari total pagu anggaran sebesar Rp.160.005.670.000.
- Tahun 2019 terealisasi anggaran sebesar Rp.148.505.803.492 atau 96,44% dari total pagu anggaran sebesar Rp.153.985.747.000.

Grafik 1  
Penyerapan Anggaran  
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan  
Tahun 2015 s.d 2019



### 2. Capaian Regulasi Periode 2015-2019

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan telah menerbitkan beberapa kebijakan dalam bentuk regulasi termasuk Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sebagai acuan bagi Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/LPNK) serta pemerintah daerah terhadap tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kewilayahan dan ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Pada kurun waktu tahun 2015 s.d Oktober 2019 telah diselesaikan sebanyak 319 regulasi bidang administrasi kewilayahan, berupa 9 (sembilan) Peraturan Pemerintah, 1

(satu) Peraturan Presiden, dan 12 Permendagri sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta 297 Permendagri tentang Batas Daerah, dengan rincian :

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Pasuruan dari Wilayah Kota Pasuruan ke Wilayah Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur;
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Nias dari Wilayah Kota Gunungsitoli ke Wilayah Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kepulauan Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat;
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku;
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun dari Wilayah Kota Madiun ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur;
- Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja;
- Permendagri Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Pengelolaan Pengembangan Dan Pembangunan Kelautan;
- Permendagri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Permendagri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
- Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- Permendagri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah;
- Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran;
- Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
- Ditetapkannya 297 Permendagri tentang Batas Daerah.

### **3. Capaian Kinerja Strategis Periode 2015-2019**

- Capaian pelayanan publik bidang perizinan dan non perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Daerah :
  - Sebanyak 548 daerah telah membentuk kelembagaan PTSP;
  - Sebanyak 445 daerah telah mendelegasikan kewenangannya kepada PTSP daerah;
  - Sebanyak 359 daerah telah memiliki SOP; dan
  - Sebanyak 394 daerah telah memiliki dan mengoperasikan *website* dalam pelayanannya.
- Capaian pelayanan publik bidang perizinan dan non perizinan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) :
  - Dari keseluruhan 514 Kabupaten/Kota, terdapat 368 Kabupaten/ Kota telah menerapkan PATEN.
- Capaian kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi :
  - Terlaksananya dukungan Dekonsentrasi peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di 34 Provinsi.
- Capaian fasilitasi kerjasama daerah :
  - Tahun 2018 Kementerian Dalam Negeri telah memfasilitasi Pemerintah Daerah dengan dunia usaha dengan ditandatanganinya 4 (empat) kesepakatan kerjasama di 3 (tiga) kawasan, yaitu Danau Toba, Borobudur dan Mandalika.
  - Tahun 2019 Kementerian Dalam Negeri telah memfasilitasi Pemerintah Daerah dengan Industri/Swasta dalam pengembangan pendidikan vokasi di 3 Kawasan (Pulau Seribu, Kawasan Bromo Tengger dan Kawasan Wakatobi), yaitu dengan ditandatanganinya 3 (tiga) kesepakatan bersama.
- Capaian kerjasama perbatasan antar negara :
  - Terlaksananya kerjasama penegasan batas negara wilayah darat dan kerjasama pengelolaan kawasan perbatasan yang dilihat dari aspek sosial

- budaya dan sosial ekonomi dengan 3 (tiga) negara tetangga melalui forum kerjasama bilateral (RI-Malaysia, RI-Papua Nugini, RI- RDTL).
- Capaian pembangunan sarpras pemerintahan di daerah perbatasan antar negara dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) :
    - Terbangunnya 78 unit sarpras pemerintahan, berupa 5 unit kantor perbatasan, 9 unit kantor kecamatan, 33 unit kantor desa/kelurahan, 30 unit balai pertemuan umum, 1 unit tower pemantau.
  - Capaian pemenuhan kompetensi aparatur Satpol PP, PPNS dan Satlinmas:
    - Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP, PPNS dan Satlinmas sebanyak 18.389 orang.
  - Capaian pemenuhan kompetensi personil pemadam kebakaran :
    - Terlaksananya peningkatan kapasitas personil pemadam kebakaran sebanyak 3.434 orang.
  - Capaian pembangunan sarpras penanggulangan bencana :
    - Terbangunnya 62 unit sarpras penanggulangan bencana di daerah rawan, berupa 25 unit kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), 35 unit gudang peralatan dan logistik, dan 2 unit gedung Pusdalops.
  - Capaian penegasan batas daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) :
    - terselesaikannya 322 segmen batas antar daerah, meliputi 77 segmen batas antar Provinsi dan 245 segmen batas antar Kabupaten/Kota.
    - Sehingga secara keseluruhan dari 979 segmen batas antar daerah (165 segmen batas antar Provinsi dan 814 segmen batas antar Kabupaten/Kota), telah selesai ditegaskan sebanyak 615 segmen (128 segmen batas antar Provinsi dan 487 segmen batas antar Kabupaten/Kota) yang ditetapkan dengan 516 Permendagri. Dengan demikian masih terdapat 236 segmen dalam proses tahapan penegasan batas daerah dan 128 segmen belum dilakukan penegasan batas daerah.

## **D. Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020-2024**

### **1. Pendahuluan**

Mengacu pada Visi dan Misi Presiden serta Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024, maka Renstra Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020-2024 secara konsisten diarahkan pada upaya-upaya mendukung lingkup tugas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dalam penyelenggaraan sebagian tugas Kementerian Dalam Negeri di bidang pembinaan administrasi kewilayahan. Dari 7 (tujuh) Program Prioritas Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri mendapatkan penugasan untuk mengawal ketujuh Program Nasional (PN) tersebut, yaitu :

- **PN-1** Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;

- **PN-2** Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- **PN-3** Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing;
- **PN-4** Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- **PN-5** Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- **PN-6** Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
- **PN-7** Memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Dari ketujuh Program Nasional tersebut, terdapat 3 (tiga) Program Nasional yang berkaitan dengan bidang tugas Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu **PN-2**, **PN-6** dan **PN-7**. Keterkaitan Program Prioritas tersebut dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 1**  
**Keterkaitan antara Prioritas**  
**Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan,**  
**Dengan Prioritas Kemendagri dan Prioritas Pembangunan Nasional**

<b>Pioritas Nasional (PN)</b>		<b>Prioritas Kemendagri</b>		<b>Prioritas Ditjen Bina Adwil</b>	
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas	1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas		-
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing	3	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing		-
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan		-
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar		-
6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan



Prioritas Nasional (PN)		Prioritas Kemendagri		Prioritas Ditjen Bina Adwil	
					bencana, dan perubahan iklim
7	Memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, dan transformasi pelayanan publik	7	Memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, dan transformasi pelayanan publik	7	Memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, dan transformasi pelayanan publik

Sumber : Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024

Dengan mengacu pada RPJMN 2020-2024, maka Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 merupakan Rencana Kerja Tahun pertama implementasi pencapaian Visi Misi Presiden yang diarahkan pada upaya-upaya dalam mendukung Peran Strategis Kementerian Dalam Negeri di bidang pemerintahan dalam negeri dengan memperhatikan Visi, Misi, dan Arah Kebijakan untuk lima tahun ke depan, serta kondisi obyektif dan dinamika lingkungan strategis, keberlanjutan kebijakan pembangunan, dan tuntutan perubahan untuk mewujudkan kondisi yang lebih ideal terkait lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri.

Atas pertimbangan tersebut, telah ditetapkan Peran Strategis Kementerian Dalam Negeri yaitu "Kementerian Dalam Negeri harus mampu menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integritas Bangsa". Dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi "Kementerian Dalam Negeri yang adaptif, responsif dan inovatif dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".

Untuk mewujudkan Peran Strategis tersebut, maka ditetapkan Arah Kebijakan Strategis Kementerian Dalam Negeri, yaitu :

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, serta peningkatan kapasitas dan tata kelola pemerintahan desa, meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan, dan penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibum-linmas.

Sejalan dengan Peran dan Arah Kebijakan tersebut, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri periode 2020-2024, yaitu :

**Tujuan Pertama (T1)** : Terwujudnya sistem politik yang demokratis berlandaskan nilai-nilai pancasila;

**Tujuan Kedua (T2)** : Terwujudnya sinergitas pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas.

## 2. Isu Strategis Tahun 2020-2024

Berdasarkan Arah Kebijakan dan Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri periode Tahun 2020-2024, maka Peran Strategis Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020-2024 diarahkan pada upaya-upaya dalam mendukung sebagian tugas Kementerian Dalam Negeri di bidang administrasi kewilayahan. Terkait dengan hal tersebut, dalam rangka mengoptimalkan peran tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi isu strategis bidang administrasi kewilayahan yang perlu kejelasan dan penataan lebih lanjut, antara lain :

- a. Belum optimalnya kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mendukung kemudahan berusaha di daerah. Salah satu aspek penting yaitu belum semua kewenangan perizinan dilimpahkan kepada PTSP, disamping itu juga terkait pengelolaan PTSP untuk 5 (lima) tahun ke depan perlu mendapatkan kejelasan utamanya dalam penyelenggaraan PTSP pasca *Omnibus Law* dan *OSS*, mewujudkan *Zona integritas* di PTSP, dan mewujudkan kelembagaan PTSP yang profesional dalam mendukung target investasi Daerah.
- b. Belum optimalnya peran kerjasama daerah sebagai instrumen penyelesaian *disparitas* wilayah, pengembangan ekonomi kawasan, pengelolaan lingkungan, manajemen konflik antar daerah dan ego kedaerahan.
- c. Minimnya dukungan keuangan APBN dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah, sehingga masih terdapat tugas dan kewenangan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi menggunakan dana APBD.
- d. Belum optimalnya peran Pol PP, Damkar dan Satlinmas di daerah dalam penyelenggaraan urusan Trantibumlinmas sebagai urusan wajib pelayanan dasar, karena minimnya dukungan anggaran, SDM, maupun sarana prasarana. Di samping itu upaya pelaksanaan kewenangan Satpol PP di daerah masih belum dapat berkontribusi optimal terhadap peningkatan pelayanan publik, peningkatan PAD, dan peningkatan iklim berusaha.
- e. Belum terintegrasinya perencanaan tata ruang dengan perencanaan pembangunan maupun keterpaduan pelaksanaan penyediaan layanan pada kawasan perkotaan sehingga menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan perkotaan seperti banjir, transportasi, persampahan, dan fasilitas publik lainnya.
- f. Dalam penyelesaian segmen batas daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga saat baru terselesaikan 615 segmen batas dari keseluruhan 979 segmen, sehingga berpengaruh dalam penetapan batas administrasi dan penentuan

luas wilayah sebagai acuan untuk penghitungan DAU, dan pelaksanaan Pilkada. Terkait batas laut yang merupakan kewenangan Provinsi, ke depan akan menentukan dalam penghitungan luas wilayah sehingga dibutuhkan penguatan peran Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dalam melakukan penegasan batas laut.

### **3. Sasaran, dan Indikator Kinerja Program Tahun 2020-2024**

Sesuai dengan Tujuan ke-2 dari Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024, terdapat 2 (dua) Sasaran Program dengan 12 target Indikator Kinerja Program (IKP) yang menjadi penugasan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu :

**Sasaran Program Pertama** "Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat", dicapai dengan 4 (empat) target indikator kinerja :

- a. Persentase pengelolaan manajemen SDM ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang sesuai standar;
- b. Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas berdasarkan kategorisasi (tibumtranmas, bencana, damkar);
- c. Jumlah Daerah yang menyelenggarakan SPM Trantibumlinmas sesuai standar;
- d. Jumlah sarpras bidang Trantibumlinmas.

**Sasaran Program Kedua** "Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan", dicapai dengan 8 (delapan) target indikator kinerja :

- Jumlah PTSP Prima yang berbasis elektronik;
- Jumlah Daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik;
- Jumlah kumulatif daerah yang batas daerahnya definitif;
- Jumlah Sarpras bidang pemerintahan di kawasan perbatasan negara serta PPKT;
- Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah;
- Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan;
- Jumlah daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penyelenggaraan kawasan khusus bagi kepentingan strategis Nasional; dan
- Jumlah Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan di kecamatan yang efektif.

### **E. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 merupakan penjabaran Tahun pertama pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RKP Tahun 2020 yang menggunakan prinsip *money follow program*, perlu adanya sinkronisasi perencanaan penganggaran, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Dokumen RKP Tahun 2020 menjabarkan lebih rinci Prioritas Nasional ke dalam Program Kementerian/Lembaga. Penjabaran Prioritas Nasional dilakukan untuk menjaga kesinambungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, serta menjadi upaya pengendalian pencapaian sasaran Prioritas Nasional.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, Pemerintah telah menetapkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, yaitu "peningkatan SDM untuk dorong pertumbuhan berkualitas" dalam rangka mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN melalui optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah dan swasta). Tema tersebut diturunkan dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Pendekatan tersebut dilakukan dalam rangka mengupayakan integrasi substansi (hulu-hilir/holistik), integrasi spasial (keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi), pembagian kewenangan (kerangka regulasi) antar Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan pembagian sumber pendanaan (kerangka pendanaan) K/L, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dana Alokasi Khusus, pembiayaan investasi, dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha, serta upaya pemanfaatan Pembiayaan Investasi Non APBN.

Kebijakan *money follow program* sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, terdapat 3 (tiga) Prioritas Nasional (PN) yang menjadi penugasan kepada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu :

1. **PN-2** Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
2. **PN-6** Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
3. **PN-7** Memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Berikut ini adalah indikator dan target capaian Prioritas Nasional Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam RKP 2020, yaitu :

#### **1. Target Prioritas Nasional (PN)**

Terdapat 6 (enam) target Prioritas Nasional bidang administrasi kewilayahan dalam mendukung Program Nasional tahun 2020, yaitu :

### **Tabel 2** **Target Prioritas Nasional Kementerian Dalam Negeri** **Bidang Administrasi Kewilayahan Tahun 2020**

No	Program Nasional/Indikator	Target
<b>PN 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan</b>		
1	Daerah yang menginisiasi kesepakatan kerjasama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	10 Daerah
<b>PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim</b>		
2	Daerah yang menerapkan SPM sub bidang trantibum	102 Daerah
3	Daerah yang menerapkan SPM sub urusan bencana	102 Daerah
4	Daerah yang menerapkan SPM sub urusan pemadam kebakaran	102 Daerah
<b>PN 7 : Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik</b>		
5	PTSP Prima berbasis elektronik di Daerah	34 Provinsi
6	Kesepakatan strategis di bidang sosial, ekonomi dan budaya	6 Kesepakatan

## 2. Target Prioritas Bidang (PB)

Terdapat 3 (tiga) target Prioritas Bidang yang menjadi penugasan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan pada RKP tahun 2020, yaitu :

**Tabel 3**  
**Target Prioritas Kementerian Dalam Negeri**  
**Bidang Administrasi Kewilayahan Tahun 2020**

No	Program Nasional/Indikator	Target
1	Daerah yang melimpahkan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan kepada camat	30 Kabupaten/Kota
2	Tugas dan kewenangan yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	8 Tugas
3	Sekretariat Bersama pembinaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	1 Sekretariat

## 3. Target Kementerian/Lembaga

Berdasarkan Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020, terdapat 33 target Prioritas Kementerian Dalam Negeri yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020, yaitu :

**Tabel 4**  
**Target Prioritas Kementerian Dalam Negeri**  
**Bidang Administrasi Kewilayahan Tahun 2020**

No	Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
<b>Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah</b>			
1.	Peningkatan penyelenggaraan hubungan Pusat dan Daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama daerah, pelayanan publik, dan pembinaan kecamatan	1. Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan di kecamatan efektif	10 Daerah
		2. Daerah yang melaksanakan kerjasama daerah dengan daerah	5 Daerah
		3. Program/kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dievaluasi berdasarkan ketentuan per undang-undangan	20 DKTP
		4. Layanan dukungan manajemen Satker	1 Layanan
<b>Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Batas Negara</b>			
2.	Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar yang dikembangkan	1. NSPK di bidang kawasan, perkotaan dan batas negara	2 NSPK
		2. Pelayanan perkotaan	1 Indeks
		3. Kawasan khusus di daerah yang dikelola secara terintegrasi dan terpadu	5 Daerah
		4. Penanganan kasus pertanahan	15 Kasus
		5. Layanan dukungan manajemen Satker	1 Layanan
<b>Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat</b>			
3.	Peningkatan pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat	1. Daerah yang memenuhi rasio PPNS di Satpol PP	2%
		2. NSPK di bidang Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	4 NSPK
		3. Aparatur Polisi Pamong Praja sesuai standar	517 Orang
		4. Daerah yang telah menyelenggarakan perlindungan masyarakat secara optimal	2%
		5. Daerah yang berkinerja baik dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman	2%
		6. Daerah yang Satpol PP-nya telah Menegakkan Perda dan Perkada secara Efektif	2%

No	Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
		7. Daerah yang memenuhi standarisasi sarana prasarana Satpol PP	2%
		8. Layanan dukungan manajemen Satker	1 Layanan
<b>Fasilitas Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran</b>			
4.	Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan dalam upaya pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran	1. Daerah yang memiliki aparatur pemadam kebakaran berdasarkan standar kualifikasi dan kompetensi	2%
		2. NSPK dibidang manajemen penanggulangan bencana dan kebakaran	11 NSPK
		3. Daerah yang menyelenggarakan penanggulangan bencana tepat fungsi	15 Daerah
		4. Layanan Pemadam Kebakaran sesuai standar di daerah	1 Dokumen
		5. Layanan dukungan manajemen Satker	1 Layanan
<b>Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi</b>			
5.	Peningkatan penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi	1. NSPK dibidang toponimi dan batas daerah	1 NSPK
		2. Daerah yang membakukan unsur rupabumi	16%
		3. Daerah yang telah definitif batas daerahnya	41,83%
		4. Pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi kewilayahan	1 Dokumen
		5. Segmen batas antar daerah yang ditetapkan dengan Permendagri	50 Segmen
		6. Layanan dukungan manajemen Satker	1 Layanan
<b>Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan</b>			
	Peningkatan dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	1. Layanan pembinaan teknis administrasi kewilayahan	1 Layanan
		2. Perencanaan	1 Layanan
		3. Layanan dukungan manajemen eselon I	1 Layanan
		4. Layanan sarana dan prasarana internal	1 Layanan
		5. Layanan Perkantoran	1 Layanan



## BAB II

# APBN DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN 2020

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019, pada pasal 1 ayat (10) disebutkan bahwa belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada Kementerian Negara/Lembaga dan bagian anggaran bendahara umum Negara, dan pada ayat (11) disebutkan bahwa belanja Pemerintah Pusat menurut Program adalah belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk mencapai Hasil (*Outcome*) tertentu pada bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan bagian anggaran bendahara umum Negara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana di atas, disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Pasal 20 ayat (1) mengatakan bahwa pimpinan kementerian/lembaga menyusun rancangan Rencana Kerja kementerian/lembaga dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah dan berpedoman pada Renstra serta pagu indikatif yang tertuang dalam Surat Edaran Bersama. Sedangkan ayat (2) menyatakan rancangan Rencana Kerja kementerian/lembaga memuat kebijakan, program dan kegiatan sebagai penjabaran renstra kementerian/lembaga.

### A. Komposisi Alokasi Anggaran Tahun 2020

Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2020, bahwa total alokasi anggaran Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020 adalah sebesar **Rp.244.534.546.000**, dengan rincian sebagai berikut:

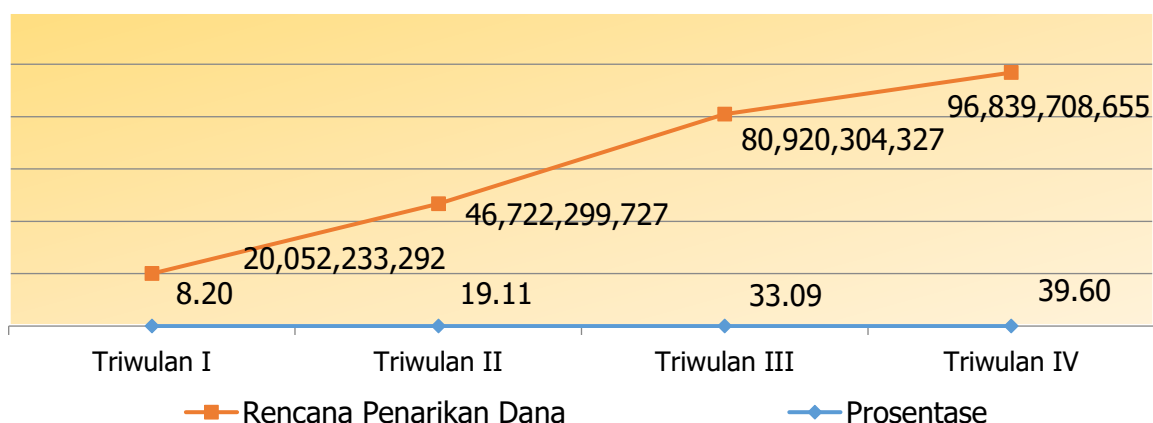
1. Pagu per jenis belanja:
  - a. Belanja Pegawai sebesar Rp.37.040.789.000,-
  - b. Belanja Barang sebesar Rp.202.843.640.000,-
  - c. Belanja Modal sebesar Rp.4.650.117.000,-
2. Pagu per Kewenangan:
  - a. Kantor Pusat sebesar Rp.134.697.142.000,-
  - b. Dekonsentrasi sebesar Rp.109.837.404.000,-

### B. Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2020

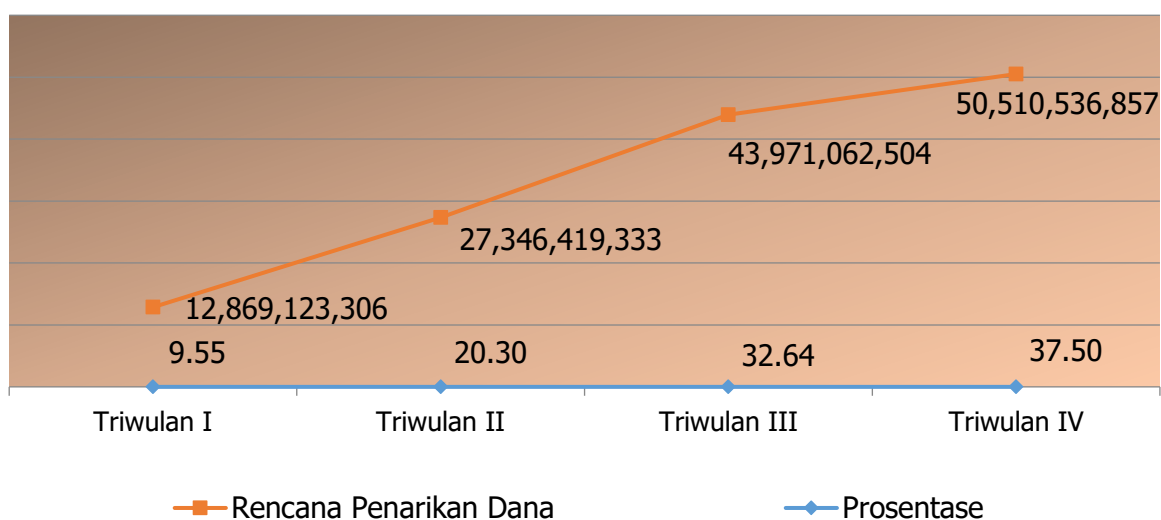
Total alokasi anggaran pada Program Bina Administrasi Kewilayahan 2020 sebesar **Rp.244.534.546.000**. Dari total anggaran tersebut, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan telah menyusun Rencana Penarikan Dana Tahun 2020 untuk kegiatan Pusat dan Dekonsentrasi sebagaimana disajikan pada grafik berikut :



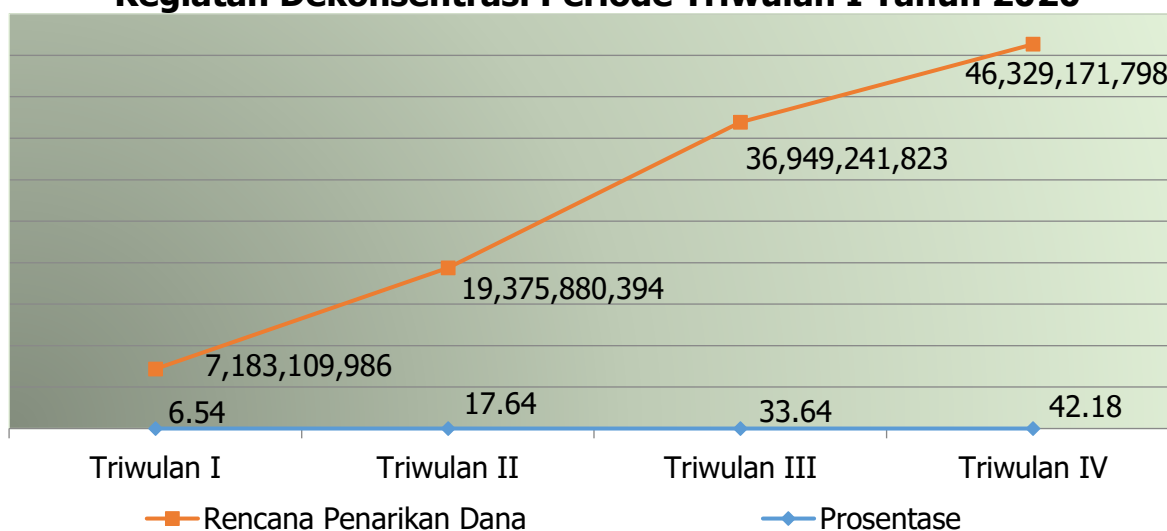
**Grafik 2**  
**Rencana Penarikan Dana**  
**Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan**  
**Periode Triwulan I Tahun 2020**



**Grafik 3**  
**Rencana Penarikan Dana**  
**Kegiatan Pusat Periode Triwulan I Tahun 2020**



**Grafik 4**  
**Rencana Penarikan Dana**  
**Kegiatan Dekonsentrasi Periode Triwulan I Tahun 2020**



Berikut ini adalah rincian pagu anggaran kegiatan Pusat, Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020, yaitu :

## 1. Kegiatan Pusat

### a. Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah

Tujuan kegiatan adalah untuk meningkatkan sinergitas hubungan pusat-daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama daerah, pelayanan publik, dan pembinaan kecamatan.

Total pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp.18.950.090.000**, dengan rincian anggaran per indikator dan komponen input kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 5**  
**Rincian Anggaran Per Indikator dan Komponen Input**  
**Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan**  
**Kerjasama Kegiatan Pusat Tahun 2020**

No	Indikator/Komponen Input	Pagu Anggaran
<b>1.</b>	<b>Daerah yang Melimpahkan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan kepada Camat (PB)</b>	<b>2.000.000.000</b>
1.1	Sosialisasi kebijakan program dan kegiatan di kelurahan	500.000.000
1.2	Pemantapan penyelenggaraan program dan kegiatan kelurahan	800.000.000
1.3	Asistensi dan Supervisi Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Kelurahan	700.000.000
<b>2.</b>	<b>Daerah yang Menyelenggarakan Pemerintahan dan Pelayanan di Kecamatan Efektif</b>	<b>1.000.090.000</b>
1.1	Asistensi Pelimpahan Kewenangan kepada Camat dalam mendukung inovasi pelayanan di kecamatan	300.090.000
1.2	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam mendukung inovasi pelayanan publik di kecamatan	350.000.000
1.3	Asistensi dan Supervisi Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Kecamatan	350.000.000
<b>3.</b>	<b>PTSP Prima Berbasis Elektronik di Daerah (PN)</b>	<b>5.000.000.000</b>
1.1	Koordinasi dan supervisi penyelenggaraan PTSP	2.000.000.000
1.2	Pengembangan aplikasi e-monev PTSP	1.000.000.000
1.3.	Bimtek penyelenggaraan PTSP berbasis elektronik	1.000.000.000
1.4	Asistensi penerapan PTSP berbasis elektronik di daerah	500.000.000
1.5	Pembinaan penyelenggaraan PTSP berbasis elektronik	500.000.000

No	Indikator/Komponen Input	Pagu Anggaran
<b>4.</b>	<b>Daerah yang Melaksanakan Kerjasama Daerah dengan Daerah</b>	<b>650.000.000</b>
4.1	Pemetaan urusan yang dapat dikerjasamakan	250.000.000
4.2	Asistensi dan supervisi pelaksanaan kerjasama	400.000.000
<b>5.</b>	<b>Daerah yang Menginisiasi Kesepakatan Kerjasama Daerah dalam rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PN)</b>	<b>2.500.000.000</b>
5.1	Pemetaan urusan yang dapat dikerjasamakan	500.000.000
5.2	Sinkronisasi potensi kerjasama di bidang ekonomi daerah	750.000.000
5.3	Asistensi dan supervisi kerjasama daerah di bidang ekonomi daerah	1.250.000.000
<b>6.</b>	<b>Program/Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang Dievaluasi Berdasarkan Ketentuan per Undang-Undang</b>	<b>1.100.000.000</b>
6.1	Sinkronisasi perencanaan program/ kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian/Lembaga	400.000.000
6.2	Monev kebijakan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Daerah	400.000.000
6.3	Koordinasi pembinaan dan pengawasan Tugas Pembantuan di Daerah	300.000.000
<b>7.</b>	<b>Tugas dan kewenangan yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik (PB)</b>	<b>3.500.000.000</b>
7.1	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	1.500.000.000
7.2	Koordinasi nasional perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	650.000.000
7.3	Penyusunan instrumen pelaksanaan korbinwas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah	850.000.000
7.4	Peningkatan kapasitas aparatur perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	500.000.000
<b>8.</b>	<b>Sekretariat Bersama pembinaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (PB)</b>	<b>2.500.000.000</b>
8.1	Koordinasi Sekretariat Bersama pembinaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	1.500.000.000
8.2	Asistensi kegiatan Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	1.000.000.000
<b>9.</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Satker</b>	<b>700.000.000</b>
9.1	Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	700.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>18.950.090.000</b>

Sumber : dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020

**b. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara**

Tujuan kegiatan adalah untuk melakukan peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar yang dikembangkan.

Total pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp.9.568.558.000**, dengan rincian anggaran per indikator dan komponen input kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 6**  
**Rincian Anggaran Per Indikator dan Komponen Input**  
**Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara**  
**Kegiatan Pusat Tahun 2020**

No	Indikator/Komponen Input	Pagu Anggaran
<b>1</b>	<b>NSPK di Bidang Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara</b>	<b>500.000.000</b>
	1.1 Kebijakan tentang Standar Pelayanan dan Tata Cara Penyerahan Fasilitas Pelayanan Perkotaan	250.000.000
	1.2 Kebijakan tentang Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan	250.000.000
<b>2</b>	<b>Pelayanan Perkotaan</b>	<b>1.000.000.000</b>
	2.1 Penyusunan indeks pelayanan perkotaan	400.000.000
	2.2 Asistensi penyelenggaraan pengelolaan perkotaan di kawasan perkotaan (Kota Baru Publik)	300.000.000
	2.3 Asistensi penyelenggaraan pengelolaan perkotaan di kawasan perkotaan (Metropolitan)	300.000.000
<b>3</b>	<b>Kesepakatan Strategis di Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya (PN)</b>	<b>4.800.000.000</b>
	3.1 Penyelesaian pembahasan isu kebijakan batas antar negara RI- Malaysia	1.000.000.000
	3.2 Persidangan ke-43 Joint Indonesia-Malaysia (JIM)	464.000.000
	3.3 Survey Investigation, Refixation, and Maintenance (Survey IRM) tanda batas internasional RI-Malaysia	2.046.465.000
	3.4 Penyelesaian pembahasan permasalahan batas antar negara RI-PNG	420.000.000
	3.5 Penyelesaian pembahasan permasalahan batas antar negara RI-RDTL	163.535.000
	3.6 Asistensi pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar	300.000.000
	3.7 Pemetaan indeks pemenuhan kebutuhan sarpras pemerintahan	406.000.000
<b>4</b>	<b>Kawasan Khusus di Daerah yang Dikelola secara Terintegrasi dan Terpadu</b>	<b>1.600.000.000</b>
	4.1 Asistensi pengelolaan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Daerah	300.000.000

No	Indikator/Komponen Input	Pagu Anggaran
4.2	Supervisi pengelolaan dan pengembangan Kawasan Khusus Lingkup I	300.000.000
4.3	Bimbingan Teknis penyelenggaraan Kawasan Khusus	200.000.000
4.4	Sinkronisasi kebijakan Pusat dan Daerah dalam rangka sinergitas pengelolaan dan pengembangan Kawasan Khusus Lingkup II	400.000.000
4.5	Asistensi dan supervisi dalam penanganan permasalahan Kawasan Khusus Lingkup II	300.000.000
4.6	Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan bidang Kawasan Khusus Lingkup II	100.000.000
<b>5</b>	<b>Penanganan Kasus Pertanahan</b>	<b>968.558.000</b>
5.1	Asistensi penanganan masalah dan konflik pertanahan di daerah	400.000.000
5.2	Sosialisasi kebijakan Pemerintah di Bidang Pertanahan	270.000.000
5.3	Peningkatan kapasitas aparatur Pemda di Bidang Pertanahan	298.558.000
<b>6</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Satker</b>	<b>700.000.000</b>
6.1	Pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	700.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>9.568.558.000</b>

Sumber : dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020

### c. Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Tujuan kegiatan adalah untuk meningkatkan pembinaan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Total pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp.16.921.225.000**, dengan rincian per indikator dan komponen input kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 7**  
**Rincian Anggaran Per Indikator dan Komponen Input**  
**Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat**  
**Kegiatan Pusat Tahun 2020**

No	Indikator/Komponen Input	Pagu Anggaran
<b>1.</b>	<b>Daerah yang Memenuhi Rasio PPNS di Satpol PP</b>	<b>1.200.000.000</b>
1.1	Pemetaan dan analisis pemenuhan kebutuhan PPNS di daerah	350.000.000
1.2	Pemenuhan kebutuhan PPNS melalui fasilitasi pembentukan PPNS	850.000.000

No	Indikator/Komponen Input	Pagu Anggaran
<b>2.</b>	<b>NSPK di Bidang Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>1.050.000.000</b>
2.1	Penyusunan Permendagri tentang Sistem Informasi Manajemen Polisi Pamong Praja	250.000.000
2.2	Penyusunan Permendagri tentang Logo, Bendera PATAKA dan Tata Upacara Satpol PP	250.000.000
2.3	Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat	250.000.000
2.4	Penyusunan Kebijakan tentang Standardisasi Polisi Pamong Praja	300.000.000
<b>3.</b>	<b>Aparatur Polisi Pamong Praja sesuai Standar</b>	<b>5.821.750.000</b>
3.1	Pemetaan formasi Jabatan Fungsional di daerah	400.000.000
3.2	Koordinasi pengelolaan tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Jabatan Fungsional Tingkat Provinsi	470.000.000
3.3	Pelaksanaan uji kompetensi kenaikan jabatan di daerah	400.000.000
3.4	Bimtek penilaian angka kredit	671.750.000
3.5	Asistensi dan supervisi pengelolaan Jabatan Fungsional	700.000.000
3.6	Sosialisasi kebijakan tentang Jabatan Fungsional Jafung Pol PP	400.000.000
3.7	Penyelenggaraan pertemuan dalam rangka koordinasi Sekretariat Bersama RANHAM 2020-2024 dan Pemerintah Provinsi serta fasilitasi konvensi Internasional	300.000.000
3.8	Asistensi dan supervisi pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia di Daerah	200.000.000
3.9	Bimbingan Teknis pelayanan publik berbasis HAM bagi camat	400.000.000
3.10	Supervisi penegakan Peraturan Daerah yang berprespektif HAM	900.000.000
3.11	Sosialisasi Kebijakan tentang Penghargaan Bagi Satuan Polisi Pamong Praja	200.000.000
3.12	Bimtek bagi PPNS dalam penyusunan rencana operasi Penegakan Perda dan proses pemberkasan acara singkat	600.000.000
3.13	Penyusunan instrumen perangkat uji Satpol PP	180.000.000
<b>4.</b>	<b>Daerah yang Menerapkan SPM Sub Bidang Trantibum (PN)</b>	<b>3.000.000.000</b>
4.1	Pendataan aspek penerapan SPM Sub Bidang Trantibum	500.000.000
4.2	Bimtek penerapan standar teknis mutu pelayanan dasar sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota	1.500.000.000

No	Indikator/Komponen Input	Pagu Anggaran
4.3	Asistensi dan supevisi penerapan SPM Sub Bidang Trantibum	1.000.000.000
<b>5.</b>	<b>Daerah yang telah Menyelenggaraan Perlindungan Masyarakat secara Optimal</b>	<b>2.255.825.000</b>
5.1	Asistensi dan supervisi penyelenggaraan perlindungan masyarakat	400.000.000
5.2	Supervisi penyelenggaraan Trantibumlinmas dalam rangka Pilkada Serentak 2020	905.825.000
5.3	Sosialisasi Permendagri Bidang Perlindungan Masyarakat	300.000.000
5.4	Pemuktahiran data Satlinmas	250.000.000
5.5	Koordinasi kerjasama Internasional Bidang Perlindungan Masyarakat pada <i>International Civil Defence Organisation (ICDO)</i>	400.000.000
<b>6.</b>	<b>Daerah yang Berkinerja Baik dalam dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman</b>	<b>1.350.000.000</b>
6.1	Penyusunan variabel ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	100.000.000
6.2	Koordinasi nasional Satuan Polisi Pamong Praja	1.100.000.000
6.3	Asistensi dan supervisi pelaksanaan Trantibum dalam rangka penyelenggaran Trantibum	150.000.000
<b>7.</b>	<b>Daerah yang Satpol PP-nya telah Menegakkan Perda dan Perkada secara Efektif</b>	<b>1.000.000.000</b>
7.1	Pendataan dan asistensi pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah	350.000.000
7.2	Supervisi penyelenggaraan penegakan Perda yang memiliki sanksi pidana oleh PPNS	350.000.000
7.3	Sosialisasi Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 tentang PPNS di Lingkungan Pemda	300.000.000
<b>8.</b>	<b>Daerah yang Memenuhi Standardisasi Sarana Prasarana Satpol PP</b>	<b>543.650.000</b>
8.1	Pemetaan standarisasi sarana dan prasarana Satpol PP di daerah	243.650.000
8.2	Asistensi pemenuhan standarisasi sarana prasarana dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan Trantibum	300.000.000
<b>9.</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Satker</b>	<b>700.000.000</b>
9.1	Pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	700.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>16.921.225.000</b>

Sumber : dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020

#### d. Kegiatan Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

Tujuan kegiatan adalah untuk meningkatkan kapasitas aparat dan kelembagaan dalam upaya pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran.

Total pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp.14.214.060.000**, dengan rincian anggaran per indikator dan komponen input kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 8**  
**Rincian Anggaran Per Indikator dan Komponen Input**  
**Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran**  
**Kegiatan Pusat Tahun 2020**

No	Indikator/Komponen Input	Pagu Anggaran
<b>1.</b>	<b>Daerah yang Menerapkan SPM Sub Urusan Bencana (PN)</b>	<b>3.000.000.000</b>
1.1	Penyusunan instrumen kebijakan penerapan SPM Sub-Urusan Bencana daerah Kabupaten/Kota	350.000.000
1.2	Asistensi dan supervisi penerapan SPM Sub Urusan Bencana	795.200.000
1.3	Bimbingan teknis mekanisme penyusunan program/kegiatan berbasis SPM Sub Urusan Bencana	600.000.000
1.4	Pengembangan portal sistem informasi penanggulangan bencana	704.800.000
1.5	Peningkatan kapasitas aparatur dalam pengintegrasian dokumen penanggulangan bencana	550.000.000
<b>2.</b>	<b>Daerah yang Menerapkan SPM Sub Urusan Pemadam Kebakaran (PN)</b>	<b>3.000.000.000</b>
2.1	Bimbingan Teknis penerapan SPM Sub Urusan Kebakaran di Daerah	750.000.000
2.2	Asistensi dan supervisi penerapan SPM Sub Urusan Kebakaran di Daerah	885.000.000
2.3	Fasilitasi peningkatan kapasitas Pemerintah Provinsi dalam penerapan SPM Sub Urusan Kebakaran	365.000.000
2.4	Penyusunan Pedoman Hitung Cepat Taksasi Kerugian Akibat Kebakaran dan Luasan Area Terdampak Kebakaran	-
2.5	Pemantapan Kesiapsiagaan Nasional Aparatur Pemadam Kebakaran	1.000.000.000
<b>3.</b>	<b>Daerah yang Memiliki Aparatur Pemadam Kebakaran berdasarkan Standar Kualifikasi dan Kompetensi</b>	<b>1.650.000.000</b>
3.1	Pemetaan dan identifikasi kapasitas Sumber Daya Pemadam Kebakaran	500.000.000
3.2	Kesiapsiagaan aparatur Pemadam kebakaran tingkat nasional melalui Skill Competition	650.000.000



No	Indikator/Komponen Input	Pagu Anggaran
3.3	Sosialisasi implementasi Jabatan fungsional pelaksanaan sub urusan kebakaran dan penyelamatan	500.000.000
<b>4.</b>	<b>Penerapan Pengintegrasian dan Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Daerah</b>	<b>-</b>
<b>5.</b>	<b>NSPK di Bidang Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran</b>	<b>2.989.430.000</b>
5.1	Penyusunan Panduan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pemadam Kebakaran	400.000.000
5.2	Penyusunan Permendagri terkait Instrumen Kelengkapan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Kebakaran dan Penyelamatan	100.000.000
5.3	Penyusunan Memorandum of Understanding tentang Kerjasama Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pemadam Kebakaran dengan Pihak Ke-Tiga	-
5.4	Rancangan Permendagri tentang Pedoman Kompetensi Perangkat Daerah Penyelenggara Sub Urusan Kebakaran dan Penyelamatan	369.430.000
5.5	Rancangan Permendagri tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Investigasi Kejadian Kebakaran	670.000.000
5.6	Rancangan Permendagri tentang Pedoman Pembinaan Organisasi Profesi Pelaksanaan Sub Urusan Kebakaran dan Penyelamatan	-
5.7	Penyusunan Naskah Akademis Pembentukan Jabatan Fungsional Analis Penyelamatan Kebakaran pada Instansi Pusat	300.000.000
5.8	Penyusunan Permendagri Tentang Formasi Jabatan Fungsional urusan kebakaran	200.000.000
5.9	Pedoman Penetapan Jumlah Aparatur dan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran	300.000.000
5.10	Penyusunan Naskah Akademis RUU Kebakaran dan Penyelamatan	300.000.000
5.11	Penyusunan Pedoman terkait Kriteria Teknis Rawan Kebakaran Permukiman dan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	350.000.000
<b>6.</b>	<b>Daerah yang Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana Tepat Fungsi</b>	<b>2.374.630.000</b>
6.1	Identifikasi dan kualifikasi daerah yang melaksanakan penanggulangan bencana	305.711.000
6.2	Evaluasi penyelenggaraan tanggap darurat dan pasca bencana	250.000.000
6.3	Asistensi dan supervisi kelembagaan penanggulangan bencana	342.630.000

No	Indikator/Komponen Input	Pagu Anggaran
6.4	Monitoring dan pendampingan penyelenggaraan Pemerintahan saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana	476.289.000
6.5	Pengintegrasian data informasi terkait kebencanaan terpadu lintas sektor di daerah	530.000.000
6.6	Pemanfaatan sarana prasarana sistem informasi kebencanaan	470.000.000
<b>7</b>	<b>Layanan Damkar sesuai Standar di Daerah</b>	<b>500.000.000</b>
7.1	Penyusunan Standar Pelayanan Damkar di Daerah	500.000.000
<b>8</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Satker</b>	<b>700.000.000</b>
8.1	Pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	700.000.000
<b>Total</b>		<b>14.214.060.000</b>

Sumber : dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020

**e. Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi**

Tujuan kegiatan adalah untuk meningkatkan penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi.

Total pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp.10.202.215.000**, dengan rincian anggaran per indikator dan komponen input kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 9**  
**Rincian Anggaran Per Indikator dan Komponen Input**  
**Direktorat Toponimi dan Batas Daerah**  
**Kegiatan Pusat Tahun 2020**

No	Indikator/Komponen Input	Pagu Anggaran
<b>1</b>	<b>NSPK di Bidang Toponimi dan Batas Daerah</b>	<b>300.000.000</b>
1.1	Penyusunan Permendagri Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	300.000.000
<b>2</b>	<b>Daerah yang Membakukan Unsur Rupabumi</b>	<b>1.932.225.000</b>
2.1	Penyelenggaraan verifikasi terhadap unsur rupabumi	1.182.225.000
2.2	Supervisi kegiatan pembakuan nama rupabumi	500.000.000
2.3	Penyusunan pokok pikiran (naskah) hubungan Pusat dan Daerah dalam pemberian nama dan Rupabumi	250.000.000
<b>3</b>	<b>Daerah yang telah Definitif Batas Daerahnya</b>	<b>1.700.000.000</b>
3.1	Penyelesaian Segmen Batas Daerah	1.700.000.000
<b>4</b>	<b>Pemutakhiran Kode dan Data Wilayah Administrasi Kewilayahan</b>	<b>550.000.000</b>

No	Indikator/Komponen Input	Pagu Anggaran
4.1	Pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan	550.000.000
<b>5</b>	<b>Segmen Batas Antar Daerah yang Ditetapkan dengan Permendagri</b>	<b>5.019.990.000</b>
5.1	Pembuatan peta batas daerah secara kartometrik	1.933.877.000
5.2	Penyelesaian perselisihan segmen batas antar daerah	969.810.000
5.3	Penyusunan rumusan kebijakan tentang Batas Daerah	2.116.303.000
<b>6</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Satker</b>	<b>700.000.000</b>
6.1	Pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	700.000.000
	<b>Total</b>	<b>10.202.215.000</b>

Sumber : dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020

#### f. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Tujuan kegiatan adalah untuk peningkatan dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. Total pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp.64.840.994.000**, dengan rincian anggaran per indikator dan komponen input kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 10**  
**Rincian Anggaran Per Indikator dan Komponen Input**  
**Sekretariat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan**  
**Kegiatan Pusat Tahun 2020**

No	Indikator/Komponen Input	Pagu Anggaran
<b>1</b>	<b>Layanan Pembinaan Teknis Administrasi Kewilayahan</b>	<b>2.901.761.000</b>
1.1	Sosialisasi kebijakan bidang administrasi kewilayahan	500.000.000
1.2	Penyusunan kegiatan strategis penyelenggaraan pembinaan wilayah	490.000.000
1.3	Penyelenggaraan sinergitas bidang pembinaan administrasi kewilayahan	740.000.000
1.4	Koordinasi dan dukungan dlm rgk Penguatan Kebijakan penyelenggaraan pembinaan wilayah	1.171.761.000
<b>2</b>	<b>Perencanaan [SBKU]</b>	<b>76.980.000</b>
2.1	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satker Eselon I Tanpa Satker Vertikal	57.660.000
2.2	Dokumen LAKIN Satker Eselon I tanpa Satker Vertikal	19.320.000
<b>3</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Eselon I</b>	<b>12.705.613.000</b>

No	Indikator/Komponen Input	Pagu Anggaran
3.1	Penyusunan rencana program dan rencana anggaran	737.969.000
3.2	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	600.000.000
3.3	Pengelolaan data dan informasi	2.071.630.000
3.4	Pengelolaan keuangan	1.933.678.000
3.5	Pengelolaan perbendaharaan	650.000.000
3.6	Pelayanan hukum	1.782.336.000
3.7	Pengelolaan kepegawaian	1.000.000.000
3.8	Pelayanan umum dan perlengkapan	1.700.000.000
3.9	Pelayanan humas dan protokoler	1.030.000.000
3.10	Pelayanan organisasi, tatalaksana, dan reformasi birokrasi	1.200.000.000
<b>4</b>	<b>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>	<b>4.991.117.000</b>
4.1	Pengadaan kendaraan bermotor	775.338.000
4.2	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	3.423.779.000
4.3	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	792.000.000
<b>5</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>44.165.523.000</b>
5.1	Gaji dan Tunjangan	37.040.789.000
5.2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	7.124.734.000
<b>Total</b>		<b>64.840.994.000</b>

Sumber : dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020

## 2. Kegiatan Dekonsentrasi

Tahun 2020 Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan membina 1 (tiga) kegiatan Dekonsentrasi yang diselenggarakan oleh 133 SKPD di 34 Provinsi dengan total anggaran sebesar **Rp.109.837.404.000**. Adapun kegiatan Dekonsentrasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tujuan kegiatan, adalah :

- 1) Meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi;
- 2) Meningkatkan sinergi Pusat dan Daerah dalam rangka koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan konkuren yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta mendorong terciptanya penyelenggaraan Dekonsentrasi yang efektif dan efisien;
- 3) Mengevaluasi LPPD Kabupaten/Kota;
- 4) Monitoring dan Evaluasi Terhadap Kerjasama yang Dilaksanakan Daerah Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi;
- 5) Memberikan Rekomendasi atas Usulan DAK Kabupaten/Kota di Wilayahnya;

- 6) Pengawasan terhadap perda kabupaten/kota;
- 7) Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah Kabupaten/Kota;
- 8) Koordinasi Kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan Antar Daerah Provinsi dan Daerah Kab./Kota dan Antar Daerah Kab./Kota di Wilayahnya (Pembinaan Penerapan SPM);
- 9) Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan kab./kota yang ada di Wilayahnya;
- 10) Mengevaluasi Kinerja Pelayanan Publik yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

Dengan rincian anggaran sebagai berikut :

**Tabel 11**  
**Pagu Anggaran**  
**Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat**  
**di Wilayah Provinsi Tahun 2020**

No	Provinsi	Pagu Anggaran			
		Setda	Bappeda	Inspektorat	DPMPTSP
1	Aceh	1.900.879.000	500.822.000	806.088.000	600.000.000
2	Sumatera Utara	1.887.401.000	512.422.000	968.468.000	600.000.000
3	Sumatera Barat	1.660.738.000	455.154.000	691.419.000	570.000.000
4	Riau	1.518.336.000	442.578.000	597.752.000	650.000.000
5	Jambi	1.601.358.000	462.834.000	600.721.000	500.000.000
6	Sumatera Selatan	1.675.514.000	465.656.000	650.369.000	570.000.000
7	Bengkulu	1.579.182.000	481.170.000	542.699.000	530.000.000
8	Lampung	1.552.969.000	434.582.000	588.573.000	550.000.000
9	Kep. Bangka Belitung	1.490.548.000	463.772.000	471.371.000	500.000.000
10	Kepulauan Riau	1.672.721.000	440.478.000	533.942.000	500.000.000
11	Jawa Barat	2.029.048.000	485.033.000	849.677.000	600.000.000
12	DKI Jakarta	512.438.000	-	-	-
13	Jawa Tengah	1.780.388.000	483.394.000	995.011.000	650.000.000
14	D.I. Yogyakarta	1.291.530.000	468.740.000	403.575.000	500.000.000
15	Jawa Timur	1.105.563.000	553.489.000	406.837.000	650.000.000
16	Banten	1.719.484.000	433.526.000	463.553.000	500.000.000
17	Bali	1.629.822.000	534.842.000	571.224.000	750.000.000
18	Nusa Tenggara Barat	1.528.670.000	474.653.000	470.092.000	500.000.000
19	Nusa Tenggara Timur	1.848.993.000	539.577.000	802.773.000	600.000.000
20	Kalimantan Barat	1.509.518.000	454.916.000	527.468.000	550.000.000
21	Kalimantan Tengah	1.756.963.000	517.887.000	636.781.000	570.000.000
22	Kalimantan Selatan	1.958.132.000	472.548.000	619.775.000	500.000.000
23	Kalimantan Timur	1.573.622.000	479.893.000	557.502.000	550.000.000
24	Kalimantan Utara	1.540.012.000	471.141.000	378.923.000	500.000.000
25	Sulawesi Utara	1.667.980.000	487.497.000	662.698.000	550.000.000
26	Sulawesi Tengah	2.163.622.000	526.366.000	722.699.000	550.000.000
27	Sulawesi Selatan	1.940.061.000	594.803.000	785.122.000	600.000.000

No	Provinsi	Pagu Anggaran			
		Setda	Bappeda	Inspektorat	DPMPTSP
28	Sulawesi Tenggara	1.612.864.000	478.914.000	597.186.000	550.000.000
29	Gorontalo	1.760.342.000	560.801.000	475.874.000	550.000.000
30	Sulawesi Barat	1.605.110.000	493.380.000	503.370.000	500.000.000
31	Maluku	2.192.834.000	523.063.000	719.422.000	500.000.000
32	Maluku Utara	1.667.002.000	509.917.000	570.578.000	500.000.000
33	Papua	1.009.044.000	545.872.000	474.525.000	650.000.000
34	Papua Barat	1.062.186.000	582.810.000	353.933.000	560.000.000
<b>Total</b>		<b>55.004.874.000</b>	<b>16.332.530.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>18.500.000.000</b>

Sumber : dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020

Berikut ini adalah besaran alokasi anggaran kegiatan Pusat dan Dekonsentrasi untuk masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020, yaitu :

**Tabel 12**  
**Total Pagu Anggaran**  
**Kegiatan Pusat dan Dekonsentrasi per Unit Kerja**  
**Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020**

No	Unit Kerja	Pagu Anggaran		Jumlah
		Pusat	Dekonsentrasi	
1	Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama	18.950.090.000	109.837.404.000	128.787.494.000
2	Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara	9.568.558.000	-	9.568.558.000
3	Direktorat Polisi Pamong Praja dan Linmas	16.921.225.000	-	16.921.225.000
4	Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	14.214.060.000	-	14.214.060.000
5	Direktorat Toponimi dan Batas Daerah	10.202.215.000	-	10.202.215.000
6	Sekretariat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan	64.840.994.000	-	64.840.994.000
<b>Total</b>		<b>134.697.142.000</b>	<b>109.837.404.000</b>	<b>244.534.546.000</b>

Sumber : dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020



### BAB III

## PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020

### A. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan hingga periode triwulan I tahun 2020 adalah sebesar **Rp. 26.080.089.964** atau **10,67%** dari total pagu anggaran sebesar **Rp. 244.534.546.000**, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 13**  
**Realisasi Anggaran**  
**Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan**  
**Periode Triwulan I Tahun 2020**

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Pusat	134.697.142.000	24.508.654.199	18,20
2	Dekonsentrasi	109.837.404.000	1.571.435.765	1,43
<b>Total</b>		<b>244.534.546.000</b>	<b>26.080.089.964</b>	<b>10,67</b>

Sumber : Bagian Keuangan, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

Berikut ini diuraikan realisasi anggaran per Kegiatan Pusat dan Dekonsentrasi untuk masing-masing Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan :

#### 1. Realisasi Kegiatan Pusat

Total realisasi anggaran kegiatan Pusat sampai s.d periode Triwulan IV Tahun 2020 adalah sebesar **Rp.24.508.654.199** atau **18,20%** dari total pagu anggaran sebesar **Rp.134.697.142.000**, dengan rincian per kegiatan:

##### a. Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah

Hingga periode triwulan I tahun 2020, total realisasi anggaran untuk kegiatan Pusat ini adalah sebesar **Rp.2.151.117.732** atau **11,35%** dari total pagu anggaran sebesar **Rp.18.950.090.000**, yang meliputi 9 indikator dengan 26 komponen input kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 14**  
**Realisasi Anggaran Kegiatan Pusat**  
**Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama**  
**Periode Triwulan I Tahun 2020**

No	Indikator/Komponen Input	Pagu Anggaran	Realisasi	%
<b>1.</b>	<b>Daerah yang Melimpahkan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan kepada Camat (PB)</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>468.729.473</b>	<b>23,44</b>
	1.1 Sosialisasi kebijakan program dan kegiatan di kelurahan	500.000.000	197707000	39,54
	1.2 Pemantapan penyelenggaraan program dan kegiatan kelurahan	800.000.000	208.470.000	26,06
	1.3 Asistensi dan Supervisi Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Kelurahan	700.000.000	62.552.473	8,94
<b>2.</b>	<b>Daerah yang Menyelenggarakan Pemerintahan dan Pelayanan di Kecamatan Efektif</b>	<b>1.000.090.000</b>	<b>38.225.630</b>	<b>3,82</b>
	1.1 Asistensi Pelimpahan Kewenangan kepada Camat dalam mendukung inovasi pelayanan di kecamatan	300.090.000	24.718.300	8,24
	1.2 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam mendukung inovasi pelayanan publik di kecamatan	350.000.000	13.507.330	3,86
	1.3 Asistensi dan Supervisi Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Kecamatan	350.000.000	-	-
<b>3.</b>	<b>PTSP Prima Berbasis Elektronik di Daerah (PN)</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>568.553.500</b>	<b>11,37</b>
	1.1 Koordinasi dan supervisi penyelenggaraan PTSP	2.000.000.000	143.031.100	7,15
	1.2 Pengembangan aplikasi e-monev PTSP	1.000.000.000	59.640.000	5,96
	1.3. Bimtek penyelenggaraan PTSP berbasis elektronik	1.000.000.000	365.882.400	36,59
	1.4 Asistensi penerapan PTSP berbasis elektronik di daerah	500.000.000	-	-
	1.5 Pembinaan penyelenggaraan PTSP berbasis elektronik	500.000.000	-	-
<b>4.</b>	<b>Daerah yang Melaksanakan Kerjasama Daerah dengan Daerah</b>	<b>650.000.000</b>	<b>109.260.440</b>	<b>16,81</b>



No	Indikator/Komponen Input	Pagu Anggaran	Realisasi	%
4.1	Pemetaan urusan yang dapat dikerjasamakan	250.000.000	36.935.500	14,77
4.2	Asistensi dan supervisi pelaksanaan kerjasama	400.000.000	72.324.940	18,08
<b>5.</b>	<b>Daerah yang Menginisiasi Kesepakatan Kerjasama Daerah dalam rangka Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah (PN)</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>224.677.400</b>	<b>8,99</b>
5.1	Pemetaan urusan yang dapat dikerjasamakan	500.000.000	224.677.400	44,94
5.2	Sinkronisasi potensi kerjasama di bidang ekonomi daerah	750.000.000	-	-
5.3	Asistensi dan supervisi kerjasama daerah di bidang ekonomi daerah	1.250.000.000	-	-
<b>6.</b>	<b>Program/Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang Dievaluasi Berdasarkan Ketentuan per Undang-Undangan</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>200.176.000</b>	<b>18,20</b>
6.1	Sinkronisasi perencanaan program/kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian/Lembaga	400.000.000	38.715.000	9,68
6.2	Monev kebijakan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Daerah	400.000.000	153.500.000	38,38
6.3	Koordinasi pembinaan dan pengawasan Tugas Pembantuan di Daerah	300.000.000	7.961.000	2,65
<b>7.</b>	<b>Tugas dan kewenangan yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik (PB)</b>	<b>3.500.000.000</b>	<b>21.300.000</b>	<b>0,61</b>
7.1	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	1.500.000.000	21.300.000	1,42
7.2	Koordinasi nasional perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	650.000.000	-	-
7.3	Penyusunan instrumen pelaksanaan korbinwas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah	850.000.000	-	-
7.4	Peningkatan kapasitas aparatur perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	500.000.000	-	-

No	Indikator/Komponen Input	Pagu Anggaran	Realisasi	%
<b>8.</b>	<b>Sekretariat Bersama pembinaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (PB)</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>342.816.400</b>	<b>13,71</b>
8.1	Koordinasi Sekretariat Bersama pembinaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	1.500.000.000	309.683.000	20,65
8.2	Asistensi kegiatan Dekonsentrasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	1.000.000.000	33.133.400	3,31
<b>9.</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Satker</b>	<b>700.000.000</b>	<b>177.378.888</b>	<b>25,34</b>
9.1	Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	700.000.000	177.378.888	25,34
<b>Jumlah</b>		<b>18.950.090.000</b>	<b>2.151.177.731</b>	<b>11,35</b>

Sumber : Bagian Keuangan, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

**b. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara**

Hingga periode Triwulan I Tahun 2020, total realisasi anggaran untuk kegiatan Pusat ini adalah sebesar **Rp.2.101.776.141** atau **21,97%** dari total pagu anggaran sebesar **Rp.9.568.558.000**, yang meliputi 6 indikator dengan 22 komponen input kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 15**  
**Realisasi Anggaran Kegiatan Pusat**  
**Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara**  
**Periode Triwulan I Tahun 2020**

No	Indikator/Komponen Input	Pagu Anggaran	Realisasi	%
<b>1</b>	<b>NSPK di Bidang Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara</b>	<b>500.000.000</b>	-	-
1.1	Kebijakan tentang Standar Pelayanan dan Tata Cara Penyerahan Fasilitas Pelayanan Perkotaan	250.000.000	-	-
1.2	Kebijakan tentang Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan	250.000.000	-	-
<b>2</b>	<b>Pelayanan Perkotaan</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>89.351.619</b>	<b>8,94</b>
2.1	Penyusunan indeks pelayanan perkotaan	400.000.000	26.160.219	6,54
2.2	Asistensi penyelenggaraan pengelolaan perkotaan di kawasan perkotaan (Kota Baru Publik)	300.000.000	-	-

No	Indikator/Komponen Input	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	2.3 Asistensi penyelenggaraan pengelolaan perkotaan di kawasan perkotaan (Metropolitan)	300.000.000	63.191.400	21,06
<b>3</b>	<b>Kesepakatan Strategis di Bidang Sosial, Ekonomi dan Budaya (PN)</b>	<b>4.800.000.000</b>	<b>1.855.233.062</b>	<b>38,65</b>
	3.1 Penyelesaian pembahasan isu kebijakan batas antar negara RI- Malaysia	1.000.000.000	124.631.562	12,46
	3.2 Persidangan ke-43 Joint Indonesia-Malaysia (JIM)	464.000.000	-	-
	3.3 Survey Investigation, Refixation, and Maintenance (Survey IRM) tanda batas internasional RI-Malaysia	2.046.465.000	1.665.676.700	81,39
	3.4 Penyelesaian pembahasan permasalahan batas antar negara RI-PNG	420.000.000	12.643.800	3,01
	3.5 Penyelesaian pembahasan permasalahan batas antar negara RI-RDTL	163.535.000	34.421.400	21,05
	3.6 Asistensi pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar	300.000.000	9.739.600	3,25
	3.7 Pemetaan indeks pemenuhan kebutuhan sarpras pemerintahan	406.000.000	8.120.000	2,00
<b>4</b>	<b>Kawasan Khusus di Daerah yang Dikelola secara Terintegrasi dan Terpadu</b>	<b>1.600.000.000</b>	<b>50.034.000</b>	<b>3,13</b>
	4.1 Asistensi pengelolaan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Daerah	300.000.000	-	-
	4.2 Supervisi pengelolaan dan pengembangan Kawasan Khusus Lingkup I	300.000.000	-	-
	4.3 Bimbingan Teknis penyelenggaraan Kawasan Khusus	200.000.000	-	-
	4.4 Sinkronisasi kebijakan Pusat dan Daerah dalam rangka sinergitas pengelolaan dan pengembangan Kawasan Khusus Lingkup II	400.000.000	50.034.000	12,51
	4.5 Asistensi dan supervisi dalam penanganan permasalahan Kawasan Khusus Lingkup II	300.000.000	-	-
	4.6 Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan bidang Kawasan Khusus Lingkup II	100.000.000	-	-
<b>5</b>	<b>Penanganan Kasus Pertanahan</b>	<b>968.558.000</b>	<b>57.256.200</b>	<b>5,91</b>
	5.1 Asistensi penanganan masalah dan konflik pertanahan di daerah	400.000.000	33.137.200	8,28

No	Indikator/Komponen Input		Pagu Anggaran	Realisasi	%
5.2	Sosialisasi kebijakan Pemerintah di Bidang Pertanahan		270.000.000	24.119.000	8,93
5.3	Peningkatan kapasitas aparatur Pemda di Bidang Pertanahan		298.558.000	-	-
<b>6</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Satker</b>		<b>700.000.000</b>	<b>49.901.260</b>	<b>7,13</b>
6.1	Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan		700.000.000	49.901.260	7,13
<b>Jumlah</b>			<b>9.568.558.000</b>	<b>2.101.776.141</b>	<b>21,97</b>

Sumber : Bagian Keuangan, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

### c. Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Hingga periode Triwulan I Tahun 2020, total realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp. 2.682.568.666** atau **15,85%** dari total pagu anggaran sebesar **Rp.16.921.225.000**, yang meliputi 9 indikator kegiatan dengan 36 komponen input kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 16**  
**Realisasi Anggaran Kegiatan Pusat**  
**Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat**  
**Periode Triwulan I Tahun 2020**

No	Indikator/Komponen Input		Pagu Anggaran	Realisasi	%
<b>1.</b>	<b>Daerah yang Memenuhi Rasio PPNS di Satpol PP</b>		<b>1.200.000.000</b>	<b>177.558.939</b>	<b>14,80</b>
1.1	Pemetaan dan analisis pemenuhan kebutuhan PPNS di daerah		350.000.000	72.738.029	20,78
1.2	Pemenuhan kebutuhan PPNS melalui fasilitasi pembentukan PPNS		850.000.000	104.820.910	12,33
<b>2.</b>	<b>NSPK di Bidang Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat</b>		<b>1.050.000.000</b>	<b>42.670.020</b>	<b>4,06</b>
2.1	Penyusunan Permendagri tentang Sistem Informasi Manajemen Polisi Pamong Praja		250.000.000	-	-
2.2	Penyusunan Permendagri tentang Logo, Bendera PATAKA dan Tata Upacara Satpol PP		250.000.000	15.060.020	6,02
2.3	Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat		250.000.000	8.520.000	3,41
2.4	Penyusunan Kebijakan tentang Standardisasi Polisi Pamong Praja		300.000.000	19.090.000	6,36

No	Indikator/Komponen Input	Pagu Anggaran	Realisasi	%
<b>3.</b>	<b>Aparatur Polisi Pamong Praja sesuai Standar</b>	<b>5.821.750.000</b>	<b>1.046.047.954</b>	<b>17,97</b>
3.1	Pemetaan formasi Jabatan Fungsional di daerah	400.000.000	84.572.800	21,14
3.2	Koordinasi pengelolaan tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Jabatan Fungsional Tingkat Provinsi	470.000.000	291.652.860	62,05
3.3	Pelaksanaan uji kompetensi kenaikan jabatan di daerah	400.000.000	-	-
3.4	Bimtek penilaian angka kredit	671.750.000	293.272.000	43,66
3.5	Asistensi dan supervisi pengelolaan Jabatan Fungsional	700.000.000	64.384.000	9,20
3.6	Sosialisasi kebijakan tentang Jabatan Fungsional Jafung Pol PP	400.000.000	-	-
3.7	Penyelenggaraan pertemuan dalam rangka koordinasi Sekretariat Bersama RANHAM 2020-2024 dan Pemerintah Provinsi serta fasilitasi konvensi Internasional	300.000.000	23.487.294	7,83
3.8	Asistensi dan supervisi pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia di Daerah	200.000.000	17.108.000	8,55
3.9	Bimbingan Teknis pelayanan publik berbasis HAM bagi camat	400.000.000	236.443.000	59,11
3.10	Supervisi penegakan Peraturan Daerah yang berprespektif HAM	900.000.000	20.052.000	2,23
3.11	Sosialisasi Kebijakan tentang Penghargaan Bagi Satuan Polisi Pamong Praja	200.000.000	-	-
3.12	Bimtek bagi PPNS dalam penyusunan rencana operasi Penegakan Perda dan proses pemberkasan acara singkat	600.000.000	15.076.000	2,51
3.13	Penyusunan instrumen perangkat uji Satpol PP	180.000.000	-	-
<b>4.</b>	<b>Daerah yang Menerapkan SPM Sub Bidang Trantibum (PN)</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>8.520.000</b>	<b>0,28</b>
4.1	Pendataan aspek penerapan SPM Sub Bidang Trantibum	500.000.000	8.520.000	1,70
4.2	Bimtek penerapan standar teknis mutu pelayanan dasar sub urusan	1.500.000.000	-	-

No	Indikator/Komponen Input	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	ketenteraman dan ketertiban umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota			
4.3	Asistensi dan supevisi penerapan SPM Sub Bidang Trantibum	1.000.000.000	-	-
<b>5.</b>	<b>Daerah yang telah Menyelenggaraan Perlindungan Masyarakat secara Optimal</b>	<b>2.255.825.000</b>	<b>96.451.700</b>	<b>4,28</b>
5.1	Asistensi dan supervisi penyelenggaraan perlindungan masyarakat	400.000.000	45.998.400	11,50
5.2	Supervisi penyelenggaraan Trantibumlinmas dalam rangka Pilkada Serentak 2020	905.825.000	17.013.000	1,88
5.3	Sosialisasi Permendagri Bidang Perlindungan Masyarakat	300.000.000	-	-
5.4	Pemuktahiran data Satlinmas	250.000.000	33.440.300	13,38
5.5	Koordinasi kerjasama Internasional Bidang Perlindungan Masyarakat pada <i>International Civil Defence Organisation (ICDO)</i>	400.000.000	-	-
<b>6.</b>	<b>Daerah yang Berkinerja Baik dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman</b>	<b>1.350.000.000</b>	<b>1.045.358.018</b>	<b>77,43</b>
6.1	Penyusunan variabel ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	100.000.000	10.331.500	10,33
6.2	Koordinasi nasional Satuan Polisi Pamong Praja	1.100.000.000	1.012.068.800	92,01
6.3	Asistensi dan supervisi pelaksanaan Trantibum dalam rangka penyelenggaran Trantibum	150.000.000	22.957.718	15,31
<b>7.</b>	<b>Daerah yang Satpol PP-nya telah Menegakkan Perda dan Perkada secara Efektif</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>98.146.916</b>	<b>9,81</b>
7.1	Pendataan dan asistensi pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah	350.000.000	33.535.200	9,58
7.2	Supervisi penyelenggaraan penegakan Perda yang memiliki sanksi pidana oleh PPNS	350.000.000	-	-
7.3	Sosialisasi Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 tentang PPNS di Lingkungan Pemda	300.000.000	64.611.716	21,54
<b>8.</b>	<b>Daerah yang Memenuhi Standardisasi Sarana Prasarana Satpol PP</b>	<b>543.650.000</b>	<b>55.854.376</b>	<b>10,27</b>

No	Indikator/Komponen Input		Pagu Anggaran	Realisasi	%
8.1	Pemetaan standarisasi sarana dan prasarana Satpol PP di daerah		243.650.000	55.854.376	22,92
8.2	Asistensi pemenuhan standarisasi sarana prasarana dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan Trantibum		300.000.000	-	-
<b>9.</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Satker</b>		<b>700.000.000</b>	<b>111.960.743</b>	<b>15,99</b>
9.1	Pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan		700.000.000	111.960.743	15,99
<b>Jumlah</b>			<b>16.921.225.000</b>	<b>2.682.568.666</b>	<b>15,85</b>

Sumber : Bagian Keuangan, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

#### d. Kegiatan Fasilitas Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran

Hingga periode Triwulan I Tahun 2020, total realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp.1.822.694.227** atau **12,82%** dari total pagu anggaran sebesar **Rp.14.214.060.000**, yang meliputi 8 indikator dengan 32 komponen input kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 17**  
**Realisasi Anggaran Kegiatan Pusat**  
**Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran**  
**Periode Triwulan I Tahun 2020**

No	Indikator/Komponen Input		Pagu Anggaran	Realisasi	%
<b>1.</b>	<b>Daerah yang Menerapkan SPM Sub Urusan Bencana (PN)</b>		<b>3.000.000.000</b>	<b>86.092.966</b>	<b>2,87</b>
1.1	Penyusunan instrumen kebijakan penerapan SPM Sub-Urusan Bencana daerah Kabupaten/Kota		350.000.000	-	-
1.2	Asistensi dan supervisi penerapan SPM Sub Urusan Bencana		795.200.000	25.987.957	3,27
1.3	Bimbingan teknis mekanisme penyusunan program/ kegiatan berbasis SPM Sub Urusan Bencana		600.000.000	53.093.794	8,85
1.4	Pengembangan portal sistem informasi penanggulangan bencana		704.800.000	-	-
1.5	Peningkatan kapasitas aparatur dalam pengintegrasian dokumen penanggulangan bencana		550.000.000	7.011.215	1,27
<b>2.</b>	<b>Daerah yang Menerapkan SPM Sub Urusan Pemadam Kebakaran (PN)</b>		<b>3.000.000.000</b>	<b>826.484.846</b>	<b>27,55</b>

No	Indikator/Komponen Input	Pagu Anggaran	Realisasi	%
2.1	Bimbingan Teknis penerapan SPM Sub Urusan Kebakaran di Daerah	750.000.000	-	-
2.2	Asistensi dan supervisi penerapan SPM Sub Urusan Kebakaran di Daerah	885.000.000	18.603.300	2,10
2.3	Faslitasi peningkatan kapasitas Pemerintah Provinsi dalam penerapan SPM Sub Urusan Kebakaran	365.000.000	-	-
2.4	Penyusunan Pedoman Hitung Cepat Taksasi Kerugian Akibat Kebakaran dan Luasan Area Terdampak Kebakaran	-	-	-
2.5	Pemantapan Kesiapsiagaan Nasional Aparatur Pemadam Kebakaran	1.000.000.000	807.881.546	80,79
<b>3.</b>	<b>Daerah yang Memiliki Aparatur Pemadam Kebakaran berdasarkan Standar Kualifikasi dan Kompetensi</b>	<b>1.650.000.000</b>	<b>581.051.080</b>	<b>35,22</b>
3.1	Pemetaan dan identifikasi kapasitas Sumber Daya Pemadam Kebakaran	500.000.000	35.009.700	7,00
3.2	Kesiapsiagaan aparatur Pemadam kebakaran tingkat nasional melalui Skill Competition	650.000.000	546.041.380	84,01
3.3	Sosialisasi implementasi Jabatan fungsional pelaksanaan sub urusan kebakaran dan penyelamatan	500.000.000	-	-
<b>4.</b>	<b>Penerapan Pengintegrasian dan Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Daerah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5.</b>	<b>NSPK di Bidang Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran</b>	<b>2.989.430.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.1	Penyusunan Panduan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pemadam Kebakaran	400.000.000	-	-
5.2	Penyusunan Permendagri terkait Instrumen Kelengkapan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Kebakaran dan Penyelamatan	100.000.000	-	-
5.3	Penyusunan Memorandum of Understanding tentang Kerjasama Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pemadam Kebakaran dengan Pihak Ketiga	-	-	-



No	Indikator/Komponen Input	Pagu Anggaran	Realisasi	%
5.4	Rancangan Permendagri tentang Pedoman Kompetensi Perangkat Daerah Penyelenggara Sub Urusan Kebakaran dan Penyelamatan	369.430.000	-	-
5.5	Rancangan Permendagri tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Investigasi Kejadian Kebakaran	670.000.000	-	-
5.6	Rancangan Permendagri tentang Pedoman Pembinaan Organisasi Profesi Pelaksanaan Sub Urusan Kebakaran dan Penyelamatan	-	-	-
5.7	Penyusunan Naskah Akademis Pembentukan Jabatan Fungsional Analis Penyelamatan Kebakaran pada Instansi Pusat	300.000.000	-	-
5.8	Penyusunan Permendagri Tentang Formasi Jabatan Fungsional urusan kebakaran	200.000.000	-	-
5.9	Pedoman Penetapan Jumlah Aparatur dan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran	300.000.000	-	-
5.10	Penyusunan Naskah Akademis RUU Kebakaran dan Penyelamatan	300.000.000	-	-
5.11	Penyusunan Pedoman terkait Kriteria Teknis Rawan Kebakaran Permukiman dan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	350.000.000	-	-
<b>6.</b>	<b>Daerah yang Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana Tepat Fungsi</b>	<b>2.374.630.000</b>	<b>234.310.403</b>	<b>9,87</b>
6.1	Identifikasi dan kualifikasi daerah yang melaksanakan penanggulangan bencana	305.711.000	-	-
6.2	Evaluasi penyelenggaraan tanggap darurat dan pasca bencana	250.000.000	29.502.350	11,80
6.3	Asistensi dan supervisi kelembagaan penanggulangan bencana	342.630.000	-	-
6.4	Monitoring dan pendampingan penyelenggaraan Pemerintahan saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana	476.289.000	69.390.503	14,57
6.5	Pengintegrasian data informasi terkait kebencanaan terpadu lintas sektor di daerah	530.000.000	78.029.700	14,72

No	Indikator/Komponen Input		Pagu Anggaran	Realisasi	%
	6.6	Pemanfaatan sarana prasarana sistem informasi kebencanaan	470.000.000	57.387.850	12,21
<b>7</b>	<b>Layanan Damkar sesuai Standar di Daerah</b>		<b>500.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	7.1	Penyusunan Standar Pelayanan Damkar di Daerah	500.000.000	-	-
<b>8</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Satker</b>		<b>700.000.000</b>	<b>94.754.932</b>	<b>13,54</b>
	8.1	Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	700.000.000	94.754.932	13,54
<b>Total</b>			<b>14.214.060.000</b>	<b>1.822.694.227</b>	<b>12,82</b>

Sumber : Bagian Keuangan, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

**e. Kegiatan Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi**

Hingga periode Triwulan I Tahun 2020, total realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp.1.408.791.746** atau **13,81%** dari total pagu anggaran sebesar **Rp.10.202.215.000**, yang meliputi 6 indikator dengan 10 komponen input kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 18**  
**Realisasi Anggaran Kegiatan Pusat**  
**Direktorat Toponimi dan Batas Daerah**  
**Periode Triwulan I Tahun 2020**

No	Indikator/Komponen Input		Pagu Anggaran	Realisasi	%
<b>1.</b>	<b>NSPK di Bidang Toponimi dan Batas Daerah</b>		<b>300.000.000</b>	<b>48.880.600</b>	<b>16,29</b>
	1.1	Penyusunan Permendagri Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan	300.000.000	48.880.600	16,29
<b>2.</b>	<b>Daerah yang Membakukan Unsur Rupabumi</b>		<b>1.932.225.000</b>	<b>185.163.072</b>	<b>9,58</b>
	2.1	Penyelenggaraan verifikasi terhadap unsur rupabumi	1.182.225.000	124.801.072	10,56
	2.2	Supervisi kegiatan pembakuan nama rupabumi	500.000.000	60.362.000	12,07
	2.3	Penyusunan pokok pikiran (naskah) hubungan Pusat dan Daerah dalam pemberian nama dan Rupabumi	250.000.000	-	-
<b>3.</b>	<b>Daerah yang telah Definitif Batas Daerahnya</b>		<b>1.700.000.000</b>	<b>446.781.394</b>	<b>26,28</b>
	3.1	Penyelesaian Segmen Batas Daerah	1.700.000.000	446.781.394	26,28

No	Indikator/Komponen Input	Pagu Anggaran	Realisasi	%
<b>4.</b>	<b>Pemutakhiran Kode dan Data Wilayah Administrasi Kewilayahan</b>	<b>550.000.000</b>	<b>88.219.300</b>	<b>16,04</b>
4.1	Pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan	550.000.000	88.219.300	16,04
<b>5.</b>	<b>Segmen Batas Antar Daerah yang Ditetapkan dengan Permendagri</b>	<b>5.019.990.000</b>	<b>509.372.080</b>	<b>10,15</b>
5.1	Pembuatan peta batas daerah secara kartometrik	1.933.877.000	299.482.480	15,49
5.2	Penyelesaian perselisihan segmen batas antar daerah	969.810.000	81.571.000	8,41
5.3	Penyusunan rumusan kebijakan tentang Batas Daerah	2.116.303.000	128.318.600	6,06
<b>6.</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Satker</b>	<b>700.000.000</b>	<b>130.375.300</b>	<b>18,63</b>
8.1	Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan	700.000.000	130.375.300	18,63
<b>Total</b>		<b>10.202.215.000</b>	<b>1.408.791.746</b>	<b>13,81</b>

Sumber : Bagian Keuangan, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

**f. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan**

Hingga periode Triwulan I Tahun 2020, total realisasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar **Rp.14.341.705.688** atau **22,12%** dari total pagu anggaran sebesar **Rp.64.840.994.000**, yang meliputi 5 indikator dengan 21 komponen input kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 19**  
**Realisasi Anggaran Kegiatan Pusat**  
**Sekretariat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan**  
**Periode Triwulan I Tahun 2020**

No	Indikator/Komponen Input	Pagu Anggaran	Realisasi	%
<b>1</b>	<b>Layanan Pembinaan Teknis Administrasi Kewilayahan</b>	<b>2.901.761.000</b>	<b>727.338.150</b>	<b>25,07</b>
1.1	Sosialisasi kebijakan bidang administrasi kewilayahan	500.000.000	-	-
1.2	Penyusunan kegiatan strategis penyelenggaraan pembinaan wilayah	490.000.000	57.481.500	11,73
1.3	Penyelenggaraan sinergitas bidang pembinaan administrasi kewilayahan	740.000.000	192.394.800	26,00

No	Indikator/Komponen Input	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1.4	Koordinasi dan dukungan dlm rgk Penguatan Kebijakan penyelenggaraan pembinaan wilayah	1.171.761.000	477.461.850	40,75
<b>2</b>	<b>Perencanaan (SBKU)</b>	<b>76.980.000</b>	<b>15.707.000</b>	<b>20,40</b>
2.1	Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satker Eselon I Tanpa Satker Vertikal	57.660.000	3.157.000	5,48
2.2	Dokumen LAKIN Satker Eselon I tanpa Satker Vertikal	19.320.000	12.550.000	64,96
<b>3</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Eselon I</b>	<b>12.705.613.000</b>	<b>1,593.509.250</b>	<b>12,54</b>
3.1	Penyusunan rencana program dan rencana anggaran	737.969.000	18.600.000	2,52
3.2	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	600.000.000	211.597.570	35,27
3.3	Pengelolaan data dan informasi	2.071.630.000	80.295.000	3,88
3.4	Pengelolaan keuangan	1.933.678.000	341.432.550	17,66
3.5	Pengelolaan perbendaharaan	650.000.000	146.192.050	22,49
3.6	Pelayanan hukum	1.782.336.000	171.007.800	9,59
3.7	Pengelolaan kepegawaian	1.000.000.000	15.050.000	1,51
3.8	Pelayanan umum dan perlengkapan	1.700.000.000	368.084.140	21,65
3.9	Pelayanan humas dan protokoler	1.030.000.000	108.701.340	10,55
3.10	Pelayanan organisasi, tatalaksana, dan reformasi birokrasi	1.200.000.000	132.548.800	11,05
<b>4</b>	<b>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>	<b>4.991.117.000</b>	<b>4.013.750.000</b>	<b>80,42</b>
4.1	Pengadaan kendaraan bermotor	775.338.000	769.000.000	99,18
4.2	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	3.423.779.000	3.244.750.000	94,77
4.3	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	792.000.000	-	-
<b>5</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>44.165.523.000</b>	<b>7.991.401.288</b>	<b>18,09</b>
5.1	Gaji dan tunjangan	37.040.789.000	6.385.806.001	17,24
5.2	Operasional dan pemeliharaan kantor	7.124.734.000	1.605.595.287	22,54
<b>Total</b>		<b>64.840.994.000</b>	<b>14.341.705.688</b>	<b>22,12</b>

Sumber : Bagian Keuangan, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

## 2. Realisasi Kegiatan Dekonsentrasi

Total realisasi anggaran untuk kegiatan Dekonsentrasi sampai dengan periode Triwulan I Tahun 2020 adalah sebesar **Rp.1.571.435.765** atau **1,43%** dari total pagu anggaran sebesar **Rp.109.658.314.000**, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 20**  
**Realisasi Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi**  
**Periode Triwulan I Tahun 2020**

No	Provinsi	Setda			Bappeda			Inspektorat			DPMPTSP		
		Pagu Anggaran	Realisasi	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Aceh	1.900.879.000	-	-	500.822.000	-	-	806.088.000	-	-	600.000.000	-	-
2	Sumatera Utara	1.887.401.000	-	-	512.422.000	-	-	968.468.000	-	-	600.000.000	-	-
3	Sumatera Barat	1.660.738.000	-	-	455.154.000	-	-	691.419.000	96.803.000	14,00	570.000.000	-	-
4	Riau	1.518.336.000	-	-	442.578.000	-	-	597.752.000	-	-	650.000.000	-	-
5	Jambi	1.601.358.000	62.400.000	3,90	462.834.000	-	-	600.721.000	-	-	500.000.000	-	-
6	Sumatera Selatan	1.675.514.000	-	-	465.656.000	-	-	650.369.000	-	-	570.000.000	-	-
7	Bengkulu	1.579.182.000	-	-	481.170.000	15.012.000	3,12	542.699.000	-	-	530.000.000	-	-
8	Lampung	1.552.969.000	-	-	434.582.000	-	-	588.573.000	-	-	550.000.000	-	-
9	Kep. Bangka Belitung	1.490.548.000	92.700.169	6,22	463.772.000	-	-	471.371.000	-	-	500.000.000	-	-
10	Kepulauan Riau	1.672.721.000	427.469.676	25,56	440.478.000	-	-	533.942.000	-	-	500.000.000	-	-
11	Jawa Barat	2.029.048.000	-	-	485.033.000	-	-	849.677.000	-	-	600.000.000	-	-
12	DKI Jakarta	512.438.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Tengah	1.780.388.000	-	-	483.394.000	-	-	995.011.000	-	-	650.000.000	-	-
14	D.I. Yogyakarta	1.291.530.000	-	-	468.740.000	-	-	403.575.000	-	-	500.000.000	-	-
15	Jawa Timur	1.105.563.000	-	-	553.489.000	-	-	406.837.000	-	-	650.000.000	-	-
16	Banten	1.719.484.000	-	-	433.526.000	-	-	463.553.000	-	-	500.000.000	-	-
17	Bali	1.629.822.000	-	-	534.842.000	-	-	571.224.000	-	-	750.000.000	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	1.528.670.000	-	-	474.653.000	-	-	470.092.000	-	-	500.000.000	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	1.848.993.000	-	-	539.577.000	-	-	802.773.000	-	-	600.000.000	-	-
20	Kalimantan Barat	1.509.518.000	-	-	454.916.000	-	-	527.468.000	-	-	550.000.000	21.011.400	3,82
21	Kalimantan Tengah	1.756.963.000	-	-	517.887.000	-	-	636.781.000	-	-	570.000.000	-	-

No	Provinsi	Setda			Bappeda			Inspektorat			DPMPTSP		
		Pagu Anggaran	Realisasi	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Pagu Anggaran	Realisasi	%
22	Kalimantan Selatan	1.958.132.000	-	-	472.548.000	-	-	619.775.000	-	-	500.000.000	-	-
23	Kalimantan Timur	1.573.622.000	-	-	479.893.000	-	-	557.502.000	-	-	550.000.000	-	-
24	Kalimantan Utara	1.540.012.000	92.619.434	6,01	471.141.000	-	-	378.923.000	-	-	500.000.000	-	-
25	Sulawesi Utara	1.667.980.000	-	-	487.497.000	-	-	662.698.000	-	-	550.000.000	-	-
26	Sulawesi Tengah	2.163.622.000	-	-	526.366.000	-	-	722.699.000	-	-	550.000.000	-	-
27	Sulawesi Selatan	1.940.061.000	-	-	594.803.000	-	-	785.122.000	-	-	600.000.000	-	-
28	Sulawesi Tenggara	1.612.864.000	-	-	478.914.000	-	-	597.186.000	-	-	550.000.000	-	-
29	Gorontalo	1.760.342.000	122.472.750	6,96	560.801.000	-	-	475.874.000	-	-	550.000.000	-	-
30	Sulawesi Barat	1.605.110.000	318.294.200	19,83	493.380.000	16.551.036	3,35	503.370.000	-	-	500.000.000	55.808.100	11,16
31	Maluku	2.192.834.000	-	-	523.063.000	-	-	719.422.000	-	-	500.000.000	-	-
32	Maluku Utara	1.667.002.000	205.620.000	12,33	509.917.000	-	-	570.578.000	-	-	500.000.000	18.392.000	3,68
33	Papua	1.009.044.000	-	-	545.872.000	-	-	474.525.000	-	-	650.000.000	26.282.000	4,04
34	Papua Barat	1.062.186.000	-	-	582.810.000	-	-	353.933.000	-	-	560.000.000	-	-
Total		55.004.874.000	1.321.576.229	2,40	16.332.530.000	31.563.036	0,19	20.000.000.000	96.803.000	0,48	18.500.000.000	121.493.500	0,66

Sumber : dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020

## B. Capaian Kinerja

### 1. Pencapaian Target Prioritas Nasional

Terdapat 6 (enam) target Prioritas Nasional bidang administrasi kewilayahan dalam mendukung Program Nasional tahun 2020, yaitu :

1. PTSP Prima berbasis elektronik di Daerah	
Target 2020	: 34 Provinsi
Realisasi s/d TW I	: <ul style="list-style-type: none"><li>• Monitoring dalam rangka koordinasi dan supervisi penyelenggaraan PTSP di 5 (lima) Provinsi;</li><li>• Koordinasi penyelenggaraan PTSP berbasis elektronik.</li></ul>
Capaian	: Tahap Persiapan
2. Daerah yang menginisiasi kesepakatan kerjasama daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	
Target 2020	: 10 Daerah
Realisasi s/d TW I	: Koordinasi Pemetaan urusan yang dapat dikerjasamakan.
Capaian	: Tahap Persiapan
3. Kesepakatan strategis di bidang sosial, ekonomi dan budaya	
Target 2020	: 6 Kesepakatan
Realisasi s/d TW I	: <ul style="list-style-type: none"><li>• Koordinasi terkait konsolidasi perundingan batas darat dan kerjasama lintas batas;</li><li>• Terlaksananya Rapat Pra Persidangan ke-6 <i>Border Croosing Agreement (BCA)</i> RI-Malaysia di Bandung;</li><li>• Terlaksananya Survey Blank Post Area di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.</li></ul>
Capaian	: Tahap persiapan
4. Daerah yang menerapkan SPM sub bidang trantibum	
Target 2020	: 102 Daerah
Realisasi s/d TW I	: -
Capaian	: Tahap Persiapan
5. Daerah yang menerapkan SPM sub urusan bencana	
Target 2020	: 102 Daerah
Realisasi s/d TW I	: Monitoring terkait asistensi dan supervisi penerapan SPM Sub Urusan Bencana.
Capaian	: Tahap Persiapan
6. Daerah yang menerapkan SPM sub urusan pemadam kebakaran	
Target 2020	: 102 Daerah
Realisasi s/d TW I	: <ul style="list-style-type: none"><li>• Monitoring terkait pengintegrasian data informasi terkait kebencanaan terpadu lintas sektor di daerah;</li></ul>

	• Monitoring terkait simulasi pemanfaatan sarana prasarana sistem informasi kebencanaan.
Capaian	: Tahap Persiapan

## 2. Pencapaian Target Prioritas Bidang

Terdapat 3 (tiga) target Prioritas Bidang yang menjadi penugasan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan pada RKP tahun 2020, yaitu :

1. Tugas dan kewenangan yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik	
Target 2020	: 8 Tugas
Realisasi s/d TW I	: -
Capaian	: Tahap Persiapan

2. Sekretariat Bersama pembinaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	
Target 2020	: 1 Sekretariat
Realisasi s/d TW I	: Koordinasi terkait Sekretariat Bersama pembinaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
Capaian	: Tahap Persiapan

3. Daerah yang melimpahkan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan kepada camat	
Target 2020	: 30 Kabupaten/Kota
Realisasi s/d TW I	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya Sosialisasi kebijakan program dan kegiatan di kelurahan;</li> <li>• Monitoring dalam rangka Asistensi dan Supervisi Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Kelurahan.</li> </ul>
Capaian	: Tahap Persiapan

## 3. Pencapaian Target Kementerian/Lembaga

Berdasarkan Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020, terdapat 33 target Prioritas Kementerian Dalam Negeri yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020, yaitu :

1. Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan di kecamatan efektif	
Target 2020	: 10 Daerah
Realisasi s/d TW I	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring dalam rangka Asistensi Pelimpahan Kewenangan kepada Camat dalam mendukung inovasi pelayanan di kecamatan;</li> <li>• Monitoring dalam rangka Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah</li> </ul>



		dalam mendukung inovasi pelayanan publik di kecamatan.
Capaian	:	Tahap Persiapan

2. Daerah yang melaksanakan kerjasama daerah dengan daerah		
Target 2020	:	5 Daerah
Realisasi s/d TW I	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring dalam rangka pemetaan urusan yang dapat dikerjasamakan;</li> <li>• Monitoring dalam rangka asistensi dan supervisi pelaksanaan kerjasama.</li> </ul>
Capaian	:	Tahap Persiapan

3. Program/kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dievaluasi berdasarkan ketentuan per undang-undangan		
Target 2020	:	20 DKTP
Realisasi s/d TW I	:	-
Capaian	:	Tahap Persiapan

4. Layanan dukungan manajemen Satker		
Target 2020	:	1 Layanan
Realisasi s/d TW I	:	Monitoring ke daerah dalam rangka sinkronisasi tugas pokok Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama.
Capaian	:	Tahap Persiapan

5. NSPK di bidang kawasan, perkotaan dan batas negara		
Target 2020	:	2 NSPK
Realisasi s/d TW I	:	-
Capaian	:	Tahap Persiapan

6. Pelayanan perkotaan		
Target 2020	:	1 Indeks
Realisasi s/d TW I	:	Monitoring asistensi penyelenggaraan pengelolaan perkotaan di kawasan perkotaan (Metropolitan).
Capaian	:	Tahap Persiapan

7. Kawasan khusus di daerah yang dikelola secara terintegrasi dan terpadu		
Target 2020	:	5 Daerah
Realisasi s/d TW I	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Daerah yang dikelola secara terintegrasi dan terpadu, yaitu Kabupaten Labuan Bajo Provinsi Nusa Tenggara Timur.</li> <li>• Monitoring dalam rangka Sinkronisasi kebijakan Pusat dan Daerah dalam rangka sinergitas pengelolaan dan pengembangan Kawasan Khusus Lingkup II;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam rangka kawasan khusus lingkup II KSPN Labuan Bajo-Flores Provinsi NTT.</li> </ul>
Capaian	:	20% (Tahap Pelaksanaan)

8. Penanganan kasus pertanahan		
Target 2020	:	15 Kasus
Realisasi s/d TW I	:	Monitoring dalam rangka Sosialisasi kebijakan Pemerintah di Bidang Pertanahan
Capaian	:	Tahap Persiapan

9. Layanan dukungan manajemen Satker		
Target 2020	:	1 Layanan
Realisasi s/d TW I	:	Monitoring ke daerah dalam rangka sinkronisasi tugas pokok Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara.
Capaian	:	Tahap Persiapan

10. Daerah yang memenuhi rasio PPNS di Satpol PP		
Target 2020	:	2%
Realisasi s/d TW I	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring dalam rangka pemetaan dan analisis pemenuhan kebutuhan PPNS di daerah;</li> <li>• Koordinasi dalam rangka supervisi kepada calon peserta diklat PPNS.</li> </ul>
Capaian	:	Tahap Persiapan

11. NSPK di bidang Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat		
Target 2020	:	4 NSPK
Realisasi s/d TW I	:	-
Capaian	:	Tahap Persiapan

12. Aparatur Polisi Pamong Praja sesuai standar		
Target 2020	:	517 Orang
Realisasi s/d TW I	:	<p>Tercapainya 219 Orang aparaturnya polisi pamong praja yang sesuai standar, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Bimtek penilaian angka kredit sebanyak 72 Orang;</li> <li>2. Peningkatan pengelolaan tim penilaian angka kredit tingkat provinsi sebanyak 87 orang;</li> <li>3. Terlaksananya Bimbingan Teknis pelayanan publik berbasis HAM bagi camat sebanyak 60 orang.</li> </ol>
Capaian	:	42,36% (Tahap Pelaksanaan)

13. Daerah yang telah menyelenggarakan perlindungan masyarakat secara optimal	
Target 2020	: 2%
Realisasi s/d TW I	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring dalam rangka Asistensi dan supervisi penyelenggaraan perlindungan masyarakat;</li> <li>• Monitoring dalam rangka Pemuktahiran data Satlinmas.</li> </ul>
Capaian	: Tahap Persiapan

14. Daerah yang berkinerja baik dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman	
Target 2020	: 2%
Realisasi s/d TW I	: -
Capaian	: (Revisi Anggaran)

15. Daerah yang Satpol PP-nya telah Menegakkan Perda dan Perkada secara Efektif	
Target 2020	: 2%
Realisasi s/d TW I	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring dalam rangka Sosialisasi Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 tentang PPNS di Lingkungan Pemda;</li> <li>• Kordinasi dalam rangka Sosialisasi Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 tentang PPNS di Lingkungan Pemda.</li> </ul>
Capaian	: Tahap Persiapan

16. Daerah yang memenuhi standardisasi sarana prasarana Satpol PP	
Target 2020	: 2%
Realisasi s/d TW I	: Monitoring dalam rangka Pemetaan standarisasi sarana dan prasarana Satpol PP di daerah
Capaian	: Tahap Persiapan

17. Layanan dukungan manajemen Satker	
Target 2020	: 1 Layanan
Realisasi s/d TW I	: Monitoring ke daerah dalam rangka sinkronisasi tugas pokok Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
Capaian	: Tahap Persiapan

18. Daerah yang memiliki aparatur pemadam kebakaran berdasarkan standar kualifikasi dan kompetensi	
Target 2020	: 2%
Realisasi s/d TW I	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring dalam rangka Pemetaan dan identifikasi kapasitas Sumber Daya Pemadam Kebakaran;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi terkait Kesiapsiagaan aparaturnya Pemadam kebakaran tingkat nasional melalui Skill Competition;</li> <li>• Terlaksananya Kesiapsiagaan aparaturnya Pemadam kebakaran tingkat nasional melalui Skill Competition sebanyak 249 Orang dari 49 Kabupaten/Kota di 20 Provinsi.</li> </ul>
Capaian	: Tahap Pelaksanaan

19. NSPK dibidang manajemen penanggulangan bencana dan kebakaran	
Target 2020	: 11 NSPK
Realisasi s/d TW I	: -
Capaian	: Tahap Persiapan

20. Daerah yang menyelenggarakan penanggulangan bencana tepat fungsi	
Target 2020	: 15 Daerah
Realisasi s/d TW I	: Monitoring dalam rangka Pengintegrasian data informasi terkait kebencanaan terpadu lintas sektor di daerah
Capaian	: Tahap Pelaksanaan

21. Layanan Pemadam Kebakaran sesuai standar di daerah	
Target 2020	: 1 Dokumen
Realisasi s/d TW I	: -
Capaian	: Tahap Persiapan

22. Layanan dukungan manajemen Satker	
Target 2020	: 1 Layanan
Realisasi s/d TW I	: Monitoring dalam rangka koordinasi, monitoring dan evaluasi ke daerah dalam rangka sinkronisasi tugas pokok Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
Capaian	: Tahap Persiapan

23. NSPK dibidang toponimi dan batas daerah	
Target 2020	: 1 NSPK
Realisasi s/d TW I	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi dalam rangka Penyusunan Permendagri Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;</li> <li>• Koordinasi dalam rangka Penyelenggaraan verifikasi terhadap unsur rupabumi;</li> <li>• Monitoring dalam rangka Supervisi kegiatan pembakuan nama rupabumi;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring dalam rangka Pemutakhiran Kode dan Data Wilayah Administrasi Kewilayahan</li> </ul>
Capaian	:	Tahap Persiapan

24. Daerah yang membakukan unsur rupabumi		
Target 2020	:	16%
Realisasi s/d TW I	:	-
Capaian	:	(Anggaran direvisi)

25. Daerah yang telah definitif batas daerahnya		
Target 2020	:	51,17%
Realisasi s/d TW I	:	<p>4 Daerah yang telah Definitif Batas Daerahnya, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabupaten Kolaka Timur <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri 51 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kab. Kolaka Timur dengan Kab. Bombana</li> <li>- Permendagri 24 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Antara Kab. Kolaka Timur dengan Kab. Kolaka Utara</li> <li>- Permendagri 13 tahun 2020 tentang Batas Daerah Antara Kab. Kolaka Timur dengan Kab. Konawe dan antara Kab. Kolaka Timur dengan Konawe Selatan</li> <li>- Permendagri 20 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kab. Kolaka Timur dengan Kab. Kolaka</li> </ul> </li> <li>• Kabupaten Magetan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri 73 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Antara Kab. Magetan dengan Kab. Karanganyar dan antara Kab. Magetan dengan Kab. Wonogiri</li> <li>- Permendagri 62 tahun 2010 tentang Batas Daerah Antara Kab. Magetan dengan Kota Madiun</li> <li>- Permendagri 105 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Antara Kab. Magetan dengan Kab. Madiun</li> <li>- Permendagri 106 tahun 2018 tentang Batas Daerah Antara Kab. Magetan dengan Kab. Ponorogo</li> <li>- Permendagri 12 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Antara Kab. Magetan dengan Kab. Ngawi</li> </ul> </li> <li>• Kabupaten Ngawi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri 73 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Antara Kab. Ngawi dengan Kab. Blora dan Antara Kab.</li> </ul> </li> </ul>

		<p>Ngawi dengan Kab. Grobogan dan Antara Kab. Ngawi dengan Kab. Karanganyar serta Antara Kab. Ngawi dengan Kab. Sragen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri 6 Tahun 2005 tentang Batas Daerah Antara Kab. Ngawi dengan Kab. Bojonegoro</li> <li>- Permendagri 109 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Antara Kab. Ngawi dengan Kab. Madiun</li> <li>- Permendagri 12 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Antara Kab. Ngawi dengan Kab. Magetan</li> <li>• Kabupaten Mampawah <ul style="list-style-type: none"> <li>- Permendagri 62 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Antara Kab. Mempawah dengan Kab. Bengkayang</li> <li>- Permendagri 60 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Antara Kab. Mempawah dengan Kota Pontianak</li> <li>- Permendagri 5 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Antara Kab. Mempawah dengan Kab. Kuburaya</li> <li>- Permendagri 39 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kab. Mempawah dengan Kab. Landak.</li> </ul> </li> </ul>
Capaian	:	16%

26. Pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi kewilayahan		
Target 2020	:	1 Dokumen
Realisasi s/d TW I	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring dalam rangka Pemutakhiran Kode dan Data Wilayah Administrasi Kewilayahan;</li> <li>2. Koordinasi terkait Pemutakhiran Kode dan Data Wilayah Administrasi Kewilayahan</li> </ol>
Capaian	:	Tahap Persiapan

27. Segmen batas antar daerah yang ditetapkan dengan Permendagri		
Target 2020	:	50 Segmen
Realisasi s/d TW I	:	<p>11 Segmen Batas Antar Daerah yang Ditetapkan dengan Permendagri, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permendagri 9 Tahun 2020 Batas Daerah Antara Kab. Bengkulu Selatan - Kab. Seluma Prov. Bengkulu;</li> <li>• Permendagri 17 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Antara Kab. Sanggau dengan Kab. Kubu Raya;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permendagri 5 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Antara Kab. Mempawah dengan Kab. Kubu Raya;</li> <li>• Permendagri 6 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Antara Kab. Sanggau dengan Kab. Bengkayang;</li> <li>• Permendagri 12 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Antara Kab. Magetan dengan Kab. Ngawi;</li> <li>• Permendagri 13 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Antara Kab. Konawe dengan Kab. Kolaka Timur dan Antara Kab. Konawe selatan dengan Kab. Kolaka Timur;</li> <li>• Permendagri 1 Tahun 2020 tentang Batas Daerah antara Kab. Manokwari Selatan dengan Kab. Pegunungan Arfak Prov. Papua;</li> <li>• Permendagri 2 Tahun 2020 tentang Batas Daerah antara Kab. Asmat dengan Kab. Mappi prov. Papua;</li> <li>• Permendagri 3 tahun 2020 tentang Batas Daerah antara Kab. Asmat dengan Kab. Boven Digoel Prov. Papua;</li> <li>• Permendagri 4 Tahun 2020 tentang Batas Daerah antara Kab. Boven Digoel dengan Kab. Mappi Prov. Papua</li> </ul>
Capaian	: 22%

28. Layanan dukungan manajemen Satker	
Target 2020	: 1 Layanan
Realisasi s/d TW I	: Monitoring dan Koordinasi dalam rangka sinkronisasi tugas pokok Dit. Toponimi dan Batas Daerah;
Capaian	: -

29. Layanan pembinaan teknis administrasi kewilayahan	
Target 2020	: 1 Layanan
Realisasi s/d TW I	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring dalam rangka Penyusunan kegiatan strategis penyelenggaraan pembinaan wilayah;</li> <li>2. Koordinasi dalam rangka Penyusunan kegiatan strategis penyelenggaraan pembinaan wilayah;</li> <li>3. Monitoring dalam rangka Penyelenggaraan sinergitas bidang pembinaan administrasi kewilayahan;</li> </ol>

		4. Monitoring Penguatan Kebijakan penyelenggaraan pembinaan wilayah
Capaian	:	-

30. Perencanaan		
Target 2020	:	1 Layanan
Realisasi s/d TW I	:	Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2019
Capaian	:	-

31. Layanan dukungan manajemen eselon I		
Target 2020	:	1 Layanan
Realisasi s/d TW I	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi Rapat Penyusunan Perencanaan Program Tahun 2020 dalam rangka persiapan Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021;</li> <li>2. Koordinasi dalam rangka Validasi Data Internal Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020;</li> <li>3. Koordinasi dalam rangka Fasilitasi Sistem Informasi dan Jaringan di Lingkungan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020;</li> <li>4. Monitoring dalam rangka Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran;</li> <li>5. Koordinasi dalam rangka Pelayanan Organisasi, Tatalaksana, dan Reformasi Birokrasi;</li> <li>6. Monitoring dalam rangka Harmonisasi dan Sinkronisasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</li> <li>7. Koordinasi dalam rangka Monitoring Asistensi dan Evaluasi Pengendalian Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bidang Bina Administrasi Kewilayahan;</li> <li>8. Koordinasi dalam rangka Pengelolaan Bahan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Bidang Bina Administrasi Kewilayahan;</li> <li>9. Koordinasi dalam rangka Pembinaan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Bidang Bina Administrasi Kewilayahan;</li> <li>10. Monitoring dalam rangka Pembinaan Dokumentasi dan Informasi Produk</li> </ol>



		Hukum Bidang Bina Administrasi Kewilayahan; 11. Monitoring dalam rangka Pembinaan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum Bidang Bina Administrasi Kewilayahan; 12. Koordinasi dalam rangka Penyiapan Bahan Upaya Litigasi dan Advokasi Hukum Bidang Bina Administrasi Kewilayahan; 13. Monitoring dalam rangka Penyiapan Bahan Upaya Litigasi dan Advokasi Hukum Bidang Bina Administrasi Kewilayahan; 14. Koordinasi dalam rangka Penatausahaan Verifikasi Dokumen Tagihan Belanja;
Capaian	:	-

<b>32. Layanan sarana dan prasarana internal</b>		
Target 2020	:	1 Layanan
Realisasi s/d TW I	:	1. Terlaksananya pengadaan bermotor, yaitu : a. 1 Unit kendaraan roda 2; b. 10 Unit kendaraan roda 4. 2. Terlaksananya pengadaan perangkat pengolah data dan informasi, yaitu : a. 52 Unit PC-All in One; b. 40 Unit Printer Canon imageClass; c. 20 Unit Printer Epson; d. 23 Unit Scanner Brother; e. 23 Laptop Dell Latitude; f. 1 Unit Notebook Apple MacBook Pro; g. 6 Unit LED Monitor; h. 6 unit viewsonic Slot in PC.
Capaian	:	-

<b>33. Layanan Perkantoran</b>		
Target 2020	:	1 Layanan
Realisasi s/d TW I	:	-
Capaian	:	-

### C. Permasalahan

Beberapa permasalahan terkait pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan sampai dengan periode triwulan I tahun 2020, yaitu :

1. Dari aspek penyerapan anggaran :

Tingkat penyerapan anggaran Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan masih belum sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (*Disbursement Plan*) bulanan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Belum semua Satker pengelola kegiatan Pusat dan Dekonsentrasi berpedoman kepada Rencana Penarikan Dana (*Disbursement Plan*) yang telah disusun, sehingga terjadi inkonsistensi antara jadwal kegiatan dengan rencana penarikan dana bulanan.
  - b. Adanya penyebaran *Coronairus Dkeose (Covid-19)* yang berdampak terhadap pemberhentian sementara pelaksanaan kegiatan termasuk kebijakan Pemerintah untuk bekerja di rumah atau *Working From Home (WFH)*. Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan Pemerintah :
    - Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)*;
    - Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)*;
    - Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)*;
    - Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)*;
    - Surat Edaran Permenpan Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *COVID-19* di lingkungan Instansi Pemerintah; dan
    - Surat Edaran Mendagri Nomor 440/2436/SJ tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Dari aspek pencapaian keluaran/output kinerja :
- Belum memberikan informasi yang detail terkait dengan hasil pelaksanaan kegiatan, hal ini karena Satker Pengelola kegiatan Pusat dan Dekonsentrasi masih melakukan persiapan awal pelaksanaan kegiatan, disamping itu juga keterbatasan data kinerja yang seharusnya terinformasikan melalui aplikasi E-Monev Bappenas dan aplikasi SMART Kementerian Keuangan.

#### **D. Tindak Lanjut**

Beberapa upaya yang dilakukan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2020, diantaranya :

1. Melakukan monitoring secara ketat terhadap Rencana Penarikan Dana setiap Satker Pengelola kegiatan Pusat dan Dekonsentrasi dalam hal terjadi perubahan/revisi;
2. Melakukan penyesuaian terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) Revisi sebagaimana lampiran III DIPA;

3. Menindaklanjuti arahan Bapak Menteri Dalam Negeri untuk melakukan *refocussing* dan realokasi anggaran kegiatan yang dapat ditunda dalam rangka dukungan percepatan penanganan *COVID-19*, antara lain :
  - a. Melakukan optimalisasi internal (Revisi KPA) pemenuhan kebutuhan penanganan *COVID-19* di masing-masing Unit Kerja Eselon I;
  - b. Mengantisipasi kebutuhan optimalisasi anggaran untuk *refocussing* penanganan *COVID-19* secara nasional, yang masih menunggu penetapan dari Kemenkeu;
  - c. Optimalisasi anggaran tersebut dilakukan melalui revisi anggaran tingkat satker (Revisi KPA dan/atau Kanwil Perbendaharaan), sedangkan antisipasi optimalisasi anggaran pada angka 2 dilakukan melalui *self blocking*;
  - d. Melakukan identifikasi anggaran yang akan di *self blocking* untuk antisipasi penetapan anggaran Kementerian/Lembaga oleh Kementerian Keuangan.
4. Tertib administrasi dalam penyelesaian administrasi kegiatan.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Capaian kinerja yang tersaji dalam Laporan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Periode Triwulan I Tahun 2020 merupakan merupakan media pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020.
2. Dilihat dari aspek implementasi, bahwa Nilai Pencapaian Kinerja Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan triwulan I tahun 2020 belum menunjukkan *performa* capaian maksimal, hal ini dikarenakan adanya inkonsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan kegiatan.
3. Dilihat dari aspek manfaat, belum dilakukannya penilaian dan pengukuran yang menjadi ukuran keberhasilan suatu sasaran.

### **B. Rekomendasi**

Beberapa hal yang menjadi catatan sebagai tindak lanjut capaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan ke depan antara lain :

1. Perlunya perbaikan mekanisme sistem akuntabilitas kinerja dan perangkat instrumen pendukungnya mulai dari perencanaan, penyusunan penetapan kinerja, penyusunan rencana kinerja tahunan sampai dengan pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Untuk meningkatkan kualitas Laporan Kinerja, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :
  - a. Penyusunan Pedoman Pengukuran Kinerja yang disertai dengan ketersediaan data dukung (*evidence*);
  - b. Pemetaan target kinerja bulanan/triwulanan untuk setiap indikator kinerja;
  - c. Pemantauan kinerja secara periodik bulanan/triwulanan.
3. Untuk menghasilkan capaian kinerja yang optimal, maka dalam penyusunan program dan kegiatan perlu memperhatikan target indikator kinerja yang akan dicapai.
4. Meningkatkan kualitas kinerja anggaran pada aspek implementasi, manfaat dan aspek kontek.